



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2005-2025

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. bahwa agar dapat disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana disebut pada huruf a di atas, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007.
 - c. bahwa Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya disingkat BAPPELITBANG adalah BAPPELITBANG Kabupaten Rokan Hulu;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya di sebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2011, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan

berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun kedepan yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyusunan RPJP Kabupaten Rokan Hulu bermaksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah didalam mewujudkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan yang disepakati bersama serta menjadi acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (3) Sistematika RPJP Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB V SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 4

- (1) RPJP Kabupaten menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten.

- (2) RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) RPJP Kabupaten yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) RPJM Kabupaten yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan menetapkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada Tanggal 14 Agustus 2009

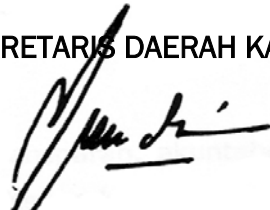
BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada Tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



Drs. H. MEWAHIDIN

PEMBINA TK. I

NIP. 19571231 198712 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009 NOMOR : 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2009

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2005-2025**

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Pengertian	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Landasan Hukum	3
1.4	Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.5	Sistematika Penulisan	5
BAB II	KONDISI UMUM	7
2.1	Gambaran Umum	7
2.2	Kondisi Saat ini, Perkiraan Masa Depan dan Isu Strategis	8
2.2.1	Demografi	8
2.2.2	Pendidikan	10
2.2.3	Kesehatan	11
2.2.4	Ketenagakerjaan	13
2.2.5	Perekonomian Daerah	14
2.2.6	Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan	16
2.2.7	Perkebunan	19
2.2.8	Kehutanan	20
2.2.9	Sosial, dan Budaya	21
2.2.10	Sarana dan Prasarana	24
2.2.11	Energi Listrik	27
2.2.12	Pemerintahan	28
2.3	Modal Dasar	30
BAB III	VISI , MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	33
3.1	Visi	33
3.2	Misi	34
3.3	Tujuan dan Sasaran	35
BAB IV	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	39
4.1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hulu yang Mandiri, Berdayasaing Tinggi dan Berakhlak Mulia	39
4.2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal	50
4.3	Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat secara Merata dan Proporsional	63
4.4	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Partisipatif	66
4.5	Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi Dan Ekologi	72

BAB V	SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	76
5.1	Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah	76
5.1.1	Skenario Pembangunan Wilayah	76
5.1.2	Skenario Pengembangan Ekonomi	81
5.2	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	85
BAB VI	PENUTUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka setiap Pemerintah Daerah juga memiliki tugas yang sama untuk mencapai tujuan bernegara melalui pelaksanaan pembangunan di daerah.

Selama ini telah disusun rencana pembangunan daerah untuk memberikan arah pembangunan daerah, dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Eksistensi rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai pengaruh dan perubahan yang terjadi pada konteks lokal, nasional, dan internasional.

Mengingat akan peran penting dan strategis dari rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan di daerah untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007.

RPJPD Kabupaten Rokan Hulu ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penetapan visi dan misi pembangunan selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam dua puluh tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan/RPJP), jangka menengah (5 tahunan/RPJM-Renstra) dan jangka pendek (1 tahunan / RKPD). Dengan demikian penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJP Daerah juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga

kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

Rencana yang termuat di dalam RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 didasarkan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

1.4 Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu dan RPJPD Propinsi Riau dan RPJP Nasional

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Propinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPN bahwa pemerintah daerah, diamanatkan untuk menyusun RPJPD

Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025

1.4.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu dan RPJMD

RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJM Daerah. RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Rokan Hulu yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

1.4.3 Hubungan RPJPD dan RTRW Kabupaten Rokan Hulu

RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 merupakan perencanaan yang bersifat makro, filosofis, dan visioner yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan seluruh ruang daratan, dan udara. RTRW Kabupaten Rokan Hulu memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang yang memuat pengertian RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu, proses penyusunan, maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu, landasan hukum, hubungan RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan gambaran umum dan kondisi saat ini, perkiraan masa depan dan isu strategis dalam berbagai aspek pembangunan, serta modal dasar.

Bab III Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan jangka panjang daerah, dan misi pembangunan daerah atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini dijelaskan pula sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Bab V Skenario dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menguraikan skenario pembangunan jangka panjang daerah terutama skenario pembangunan ekonomi dan skenario pembangunan wilayah. Bab ini juga menjelaskan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang lima tahun RPJM Daerah Pertama, RPJM Daerah Kedua, RPJM Daerah Ketiga, dan RPJM Daerah keempat serta RPJM Daerah kelima.

Bab V Penutup

Menguraikan RPJP Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rencana pembangunan lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rencana pembangunan tahunan).

BAB II

KONDISI UMUM

2.1. Gambaran Umum

Secara Geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak di antara 100° - 101° 52 Bujur Timur dan 0° - 1° 30' Lintang Utara. Kabupaten Rokan Hulu termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatera Utara.

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sekitar \pm 7.449,85 kilometer persegi atau \pm 7,88% dari luas wilayah Propinsi Riau (\pm 94.561,60 km²). Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 142 Desa. Sebagian besar daerah ini merupakan daerah dataran rendah hingga menengah, di bagian timur deretan Bukit Barisan dengan ketinggian bekisar 5-1.125 di atas permukaan laut. Di berbagai kawasan Bukit Barisan terdapat beragam flora dan fauna yang memiliki potensi wisata yang cukup besar, seperti berbagai jenis anggrek hutan, kayu kemenyan, bunga raflesia berukuran kecil dan ribuan jenis flora lainnya. Sementara potensi faunanya masih ditemukan beberapa ekor harimau, gajah, kancil, enggang, serindit, beruang dan lain sebagainya. Kondisi morfologinya bervariasi dari dataran alluvial sampai vulkanik yang terjal di bagian barat dengan kemiringan bekisar 40 % lebih dengan luas sekitar 99.135 hektar. Daerah ini beriklim tropis, temperatur rata-rata pada siang hari 31 – 32 °C dan pada malam hari 20 – 22 °C, kelembaban nisbi 90 – 100 %, dan rata-rata curah hujan berkisar 780 - 2461 mm/tahun.

Secara geomorfologi Kabupaten Rokan Hulu merupakan dataran bergelombang dan wilayah bagian barat merupakan daratan berbukit yang dibentuk oleh gugusan bukit barisan. Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat

dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian hulu yang panjangnya \pm 400 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 92 meter. Sungai ini di bagian hulu terdiri dari Sungai Rokan Kanan (Sungai Batang Lubuh) dan Sungai Rokan Kiri. Kedua sungai ini menyatu menjadi Sungai Rokan. Bahagian hilir dari sungai tersebut termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini dibagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darusalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Kepenuhan. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

Daerah dataran sedang dan tinggi (Pendalian, Rokan IV Koto, Rambah Samo dan Rambah) kondisi geologinya didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah barat Riau yaitu di sepanjang Bukit Barisan serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat disekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif ada walau kecil terutama di bagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

2.2 Kondisi Saat ini, Perkiraan Masa Depan dan Isu Strategis

Bagian ini membahas kondisi saat ini Kabupaten Rokan Hulu, perkiraan masa depan dan isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, ekonomi, prasarana dan sarana, hukum dan pemerintahan, serta tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.2.1 Demografi

a. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan data BPS Kab. Rokan Hulu, sampai akhir tahun 2005 penduduk Kabupaten Rokan Hulu berjumlah sebanyak 360.992 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan (kondisi tahun 2005), dimana sebanyak 187.962 jiwa (52,07%) merupakan penduduk laki-laki dan 173.030 jiwa (47,93%) penduduk perempuan. Secara keseluruhan

penduduk laki-laki lebih banyak seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk lebih besar dari angka 100.

Distribusi penduduk per kecamatan akhir tahun 2005, maka penduduk yang teramai terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam, dengan persentase sebesar 13,82% (49.889 jiwa), kemudian diikuti Kecamatan Tambusai Utara yakni sebesar 12,51% (45.159 jiwa). Sedangkan penduduk yang sedikit terdapat di Kecamatan Bangun Purba, yakni sebesar 3,80% (13.694 jiwa). Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ujung Batu, yakni 342 jiwa/Km², kemudian diikuti Kecamatan Rambah Hilir sebanyak 100 jiwa/Km², sedangkan yang sedikit adalah di Kecamatan Rokan IV Koto, dimana hanya 24 jiwa/Km². Padatnya penduduk per Km² di kedua kecamatan tersebut karena relatif sempitnya luas wilayah kecamatan bersangkutan.

Jumlah rumah tangga sebanyak 82.919, bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, maka distribusi penduduk per rumah tangga rata-rata terdapat sebanyak 4 dan 5 jiwa, dengan persebaran menurut kecamatan, maka penduduk yang sedikit per rumah tangga terdapat di Kecamatan Rambah Samo, yakni 3 jiwa, sedangkan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara, yakni masing-masing 5 jiwa per rumah tangga. Ini memberikan indikasi tidak terdapatnya perbedaan variasi yang besar sebaran penduduk menurut rumah tangga. Komposisi umur penduduk Kabupaten Rokan Hulu lebih banyak usia produktif ketimbang belum masuk usia produktif dan tidak produktif lagi. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah sebesar 0,58, yang berarti setiap 100 penduduk produktif akan menanggung sebanyak 58 orang usia tidak produktif. Beban ketergantungan ini relatif kecil.

b. Perkiraan Masa Depan

Penduduk merupakan potensi besar dalam pembangunan nasional dan daerah yang menyangkut aspek kuantitas dan kualitasnya. Dengan menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2002-2006 diperoleh prediksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut: 2005 (331.881 jiwa), 2010 (431.089 jiwa), 2015 (559.954 jiwa), 2020 (727.339 jiwa) dan 2025 (944.761 jiwa). Jumlah penduduk yang lebih banyak ini dapat diinterpretasikan

dalam dua sisi. Pertama, dengan jumlah penduduk yang lebih besar maka ketersediaan sumber daya manusia untuk kegiatan pembangunan menjadi lebih banyak, dengan syarat kualitas sumber daya manusianya juga baik. Kedua, dengan jumlah penduduk yang lebih besar diperlukan jumlah konsumsi bahan makanan yang lebih banyak, lahan yang lebih luas untuk penyediaan perumahan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Keseluruhan keadaan ini, baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses pencapaian visi Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga, diperlukan strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif dari jumlah penduduk yang lebih besar dimasa yang akan datang.

c. Isu Strategis

- (1) Perlu adanya penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.
- (2) Perlu adanya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin terutama penduduk miskin yang tinggal di wilayah perdesaan.
- (3) Perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih bermutu.
- (4) Perlu adanya komitmen untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis NIK Kependudukan Nasional.

2.2.2 Pendidikan

a. Kondisi Saat Ini

Kondisi Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu ditandai oleh jenjang pendidikan TK-SMA/SMK dengan 535 sekolah, 89.203 siswa, 3.283 ruang belajar dan 6.516 guru yang tersedia. Jumlah yang dibutuhkan adalah sebanyak 7.350 orang sehingga masih diperlukan guru sebanyak 834 orang. Jumlah penduduk yang buta huruf semula berjumlah 720 orang, yang telah dituntaskan sebanyak 240 orang atau 33,3 %, yang sedang dalam proses sebanyak 12 orang atau 16,7 % dan sisanya sebanyak 33,3 % lagi akan dituntaskan dalam tahun-tahun berikutnya.

Capaian bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2005 dapat dilihat indikator pendidikan secara umum, sebagai berikut :

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2005 sebesar 80,8%. Angka Partisipasi Murni (APM) 78%.
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs pada tahun 2005 adalah sebesar 70,2%. Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 58,1%.
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA pada tahun 2005 adalah 25,5%.

b. Perkiraan Masa Depan

Rasio guru terhadap murid yang ideal adalah 1:21 sehingga kebutuhan tenaga pendidik yang diperlukan untuk 20 tahun kedepan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya peningkatan layanan pendidikan dan penambahan fasilitas pendidikan serta tenaga pendidik, diharapkan angka buta huruf penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 diperkirakan akan menjadi 0%.

c. Isu Strategis

- (1) Perlu adanya pemerataan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan,
- (2) Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional.
- (3) Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan khusus.
- (4) Perlu adanya penguatan keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan.

2.2.3 Kesehatan

a. Kondisi Saat Ini

Sarana kesehatan pada tahun 2005 tersedia berupa Rumah Sakit (1 unit) Puskesmas (14 unit), Puskemas Pembantu (55 unit), Puskesmas Keliling (10 unit) Pos Yandu (346 unit). Tenaga medis yang tersedia adalah; Dokter Umum (28 orang), Dokter Spesialis (4 orang), Dokter Gigi (11 orang), Bidan (58 orang) Perawat dan Pembantu (147 orang).

Indikator kesehatan secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan (*maternal mortality rate*), Usia Harapan Hidup (UHH), dan Angka Kematian Bayi (*infant mortality rate*), dan Status Gizi Balita. Pada tahun 2005 kondisi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Angka Kematian Ibu Maternal pada tahun 2005 adalah 262 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH);
- b. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2005 berjumlah 120 adalah 29,4 per serta jenis 1000 kelahiran hidup;
- c. Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2005 adalah 69,43 per tahun;
- d. Kekurangan Gizi Pada Balita (KEP atau Kekurangan Energi Protein). KEP pada tahun 2005 yaitu gizi buruk 4%, Bgm 1,13 %, Gizi Kurang 13,6%;

Berdasarkan analisis rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, terlihat dari jumlah desa yang ada hanya 55 desa yang mempunyai Puskesmas Pembantu, jumlah serta jenis ketenagaan yang tersedia masih terbatas dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang masih rendah.

b. Perkiraan Masa Depan

Mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan masih masalah terutama di kecamatan tertentu dan desa terpencil termasuk keterpenuhan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) maka untuk 20 tahun kedepan, peningkatan mutu, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan harus mendapat perhatian khusus.

Dalam 20 tahun mendatang derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu diperkirakan akan semakin meningkat yang ditandai oleh menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya umur harapan hidup, dan berkurangnya wabah penyakit menular, dan berkurangnya gizi buruk dan gizi kurang k pada balita serta meningkatnya pemerataan sarana kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan, serta semakin membaiknya hidup bersih dan sehat masyarakat.

c. Isu Strategis

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya :

- (1) Peningkatan dan pengembangan budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Peningkatan mutu serta pemerataan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan.
- (3) Upaya pengamatan (Surveilans) dan pencegahan dini terhadap penyakit baru dan lama yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- (4) Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta status gizi balita.

2.2.4 Ketenagakerjaan

a. Kondisi Saat Ini

Jumlah angkatan kerja tahun 2005 tercatat sebanyak 238.054 orang, sedangkan jumlah kesempatan kerja sebanyak 6.594, sehingga jumlah pencari kerja (penganggur) sebanyak 14.904 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 6,26 %. Untuk tahun 2004, angkatan kerja tercatat sebanyak 148.833 orang, Sedangkan jumlah kesempatan kerja sebanyak 6.411, sehingga jumlah pencari kerja (penganggur) sebanyak 15.958 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 6,97%. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa laju pengurangan pengangguran (tahun 2004 - 2005) sebesar 6,60 %.

b. Perkiraan Masa Depan

Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja diperkirakan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas juga diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal. Secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

c. Isu Strategis

- (1) Perlunya adanya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan.
- (2) Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- (3) Perlu adanya perbaikan iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal.
- (4) Perlunya adanya sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2.2.5 Perekonomian Daerah

a. Kondisi Saat Ini

Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu baik dengan migas maupun tanpa migas didominasi oleh sektor pertanian. Struktur perekonomian sektor pertanian selama periode 2004-2006 rata-rata sebesar 67,92% dan 71.73% per tahun masing-masing dengan migas dan tanpa migas dan menunjukkan peran yang cenderung meningkat karena meningkat pertumbuhan sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit dan karet. Sektor industri menempati urutan kedua yang rata-rata per tahun sebesar 16,57% dengan migas dan 17,01% tanpa migas selama periode 2004 -2006, dengan pertumbuhannya mencapai 8,9% pada tahun 2006.

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Huhu juga tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Per kapita termasuk migas atas dasar harga berlaku telah mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu Rp. 12,81 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 17,65 juta pada tahun 2006. Begitu juga PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami sedikit kenaikan yaitu dari Rp. 5,48 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 5,79 juta pada tahun 2006. PDRB Perkapita tanpa migas atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu Rp. 12,23 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 16,80 juta

pada tahun 2006. Begitu juga PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami sedikit kenaikan yaitu dari Rp. 5,02 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 5,35 juta pada tahun 2006.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tanpa Migas yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 7.47 per tahun selama periode tahun 2004-2006 dengan laju pertumbuhan yang sedikit berfluktuatif dan cenderung menurun. LPE Kabupaten Rokan Hulu dengan Migas mencapai rata-rata 6,84% per tahun selama periode yang sama. LPE Kabupaten Rokan Hulu tanpa Migas lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Jika pada tahun 2004 LPE Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 7,71%, tahun 2005 sebesar 7.38% dan tahun 2006 sebesar 7,34%; LPE Provinsi Riau tercatat 8,17% pada tahun 2004, 8,54% pada tahun 2005 dan 8,66% pada tahun 2006.

b. Perkiraan Masa Depan

Pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2006–2025 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5% per tahun tanpa migas atau 6,8% dengan migas sesuai dengan tren selama tiga tahun terakhir. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan pengembangan teknologi serta pasar.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu baik dengan migas maupun tanpa migas selalu didominasi oleh sektor pertanian. Industri di urutan kedua dan jasa berada di urutan ke tiga. Prediksi 20 tahun ke depan struktur ekonomi diharapkan mengalami perubahan kearah penguatan sektor jasa dan

industri dalam upaya menyerap tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi dalam PDRB tanpa migas sebesar 71.74%, industri sebesar 17.29 dan jasa sebesar 10,97%. Prediksi pada tahun 2015, sektor pertanian menjadi 61,7%, dan sektor industri dan jasa meningkat masing-masing sebesar 22,3% dan 16,0%. Pada tahun 2020 sektor pertanian menjadi 46,7%, dan sektor industri dan jasa masing-masingnya sebesar 27,3% dan 26,0%. Pada tahun 2025 kontribusi sektor pertanian turun menjadi 31,7%, dan sektor industri dan jasa meningkat masing-masingnya menjadi 32,3% dan 36,0%.

c. Isu-isu Strategis

- (1) Perlu adanya perubahan struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hulu untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.
- (2) Perlu adanya peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan pemanfaatan sumber daya lokal secara cermat, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- (3) Perlu adanya penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi ke seluruh kecamatan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2.6 Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan

a. Kondisi Saat Ini

Dalam jangka panjang, pengembangan sektor pertanian perlu terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional, disamping untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan. Perhatian khusus yang diberikan dalam pengembangan sub sektor tanaman pangan adalah peningkatan produktifitas yang dapat dilaksanakan melalui peningkatan produktifitas usaha tani, perluasan lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan lahan kering. Upaya ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih banyak lahan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan pemanfaatan lahan perkebunan dapat memberikan kontribusi yang

cukup besar pada sektor pertanian karena beberapa komoditi sub sektor perkebunan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pangsa pasar produk sektor pertanian, seperti kelapa sawit dan karet.

Perikanan di Kabupaten Rokan Hulu dikelola oleh masyarakat umum yang meliputi budidaya pemeliharaan ikan di kolam, keramba dan penangkaran di perairan umum (sungai dan danau). Luas areal kolam yang dimanfaatkan pada tahun 2006 baru \pm 341 ha dan meningkat dibandingkan tahun 2005 dan 2003 yang masing-masing 302 ha dan 301 ha. Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2006 sebanyak 3.353,01 ton, yang ditangkap dari perairan umum (56,5%) dan budidaya (43,5%). Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2005 dan 2004 yang masing-masing mencapai 4.444 ton dan 4.306 ton.

Peternakan di Kabupaten Rokan Hulu pada dasarnya juga memiliki prospek pengembangan yang potensial. Prospek pengembangan sub-sektor peternakan meliputi ternak besar sapi, kerbau, kambing, domba, dan ternak kecil meliputi ayam ras dan ayam buras, serta itik. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah penghasil ternak di Propinsi Riau, khususnya untuk ternak besar (sapi dan kerbau) dan sampai saat ini telah banyak memasok kebutuhan ternak untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya. Populasi sapi pada tahun 2006 adalah 15.820 ekor, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2005 dan 2004, masing-masing sebanyak 15.176 ekor dan 15.056 ekor. Kecenderungan peningkatan juga terindikasi untuk populasi kerbau. Pada tahun 2006 jumlah populasi kerbau sebanyak 2.207 ekor, meningkat dibanding tahun 2005 sebanyak 2.167 ekor, tapi lebih kecil dari populasi pada tahun 2004 yang mencapai sebanyak 2.238 ekor.

Demikian pula dengan populasi kambing juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2006, populasi kambing sebanyak 15.361 ekor, meningkat dibanding tahun 2005 dan 2004, masing-masing sebanyak 14,346 ekor dan 14,485 ekor. Populasi domba pada tahun 2006 sebanyak 1.319 ekor, meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 dan 2005, masing-masing sebanyak 1,112 ekor dan 989 ekor. Untuk ternak kecil, prospek pengembangan pada ayam kampung (buras) dan ayam ras, baik untuk pedaging maupun petelur dan itik.

Untuk ayam ras, populasi ayam pedaging pada tahun 2006 sebanyak 196.250 ekor, mengalami penurunan dibandingkan dengan populasi tahun 2005 yang mencapai 245.150 ekor dan tahun 2004 sebanyak 219.710 ekor. Populasi ayam kampung pada tahun 2006 sebanyak 252.466 ekor, meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 251.848 ekor dan turun dari tahun 2004 sebanyak 269.220 ekor. Sedangkan untuk itik, populasi pada tahun 2006 sebanyak 24.678 ekor, meningkat dibandingkan dengan populasi tahun 2005 dan 2004 masing-masing sebanyak 21.710 ekor dan 20.951 ekor.

b. Perkiraan Masa Depan

Prediksi pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang perlu dilakukan selama 20 tahun ke depan adalah bentuk pertanian modern dan agribisnis maju yang meliputi juga kegiatan pengolahan hasil (agro-industries) dan pemasaran, baik domestik maupun luar negeri dengan tahapan tertentu. Pada tahun 2010 diharapkan terjadi peningkatan kapasitas produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas, khususnya pertanian rakyat yang mengusahakan tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan dan perubahan pola subsisten menjadi komersial atau berorientasi keuntungan yang dikelola secara profesional. Perbaikan pengelolaan tanaman perkebunan; pembangunan industri hilir berbasis teknologi maju untuk mengolah hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, terutama untuk menunjang kebutuhan pangan, industri, dan bahan energi (*biofuel*); serta pembangunan agroindustri pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan dengan penjaminan kontinuitas produksi dan stabilitas mutu. Pada tahun 2015 diperkirakan telah terbentuk pasar lokal dan regional yang mendorong berkembangnya kegiatan agrobisnis melalui diversifikasi, jumlah dan mutu produk; peningkatan produktivitas perikanan, peternakan dan usaha skala besar melalui perbaikan manajemen produksi; serta peningkatan produksi dan mutu produk perkebunan melalui upaya *replanting* dengan menggunakan bibit unggul dan hasil bioteknologi. Pada tahun 2020 diharapkan telah terbangun sistem pengadaan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan secara massal dan bersertifikat; sedang tahun 2025 dengan terciptanya hubungan saling menguntungkan antara pertanian rakyat dengan usaha skala besar dapat

mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan perluasan kesempatan kerja.

c. Isu-Isu Strategis

- (1) Perlu adanya pengembangan agribisnis tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu dalam penyediaan bibit, pupuk, irigasi, pengolahan, penyuluh, dan jaringan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- (2) Perlu adanya penguatan sistem pertanian pangan melalui intensifikasi dan perluasan area pertanian untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu lumbung beras.
- (3) Perlu adanya peningkatan jaringan irigasi teknis

2.2.7 Perkebunan

a. Kondisi Saat Ini

Pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih bertumpu pada pembangunan dari sektor pertanian dengan kontribusi utama subsektor perkebunan dan tanaman pangan. Penekanan pembangunan dan pengembangan pada sektor ini didukung oleh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang morfologi dan topografinya sesuai untuk tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Data pertumbuhan sektor pertanian tahun 2006 sebesar 6,24% tanpa migas atau 6,23% termasuk migas. Angka pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2004 dan 2005 yang masing-masing sebesar 6,63% dan 6,35% tanpa migas. Kalau termasuk migas, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari tahun 2005 sebesar 5,89 dan lebih rendah dari tahun 2004 sebesar 6,42. Kabupaten Rokan Hulu merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan terutama kelapa sawit yang luas arealnya mencapai 233.684 (31,37%) pada tahun 2004.

b. Perkiraan Masa Depan

- (1) Dalam 20 tahun ke depan, investasi di bidang perkebunan diperkirakan akan terus meningkat dengan mengikut sertakan perkebunan rakyat dan mengembalikan hak-hak tanah ulayat masyarakat.

- (2) Produksi perkebunan dan diversifikasi hasil produksi diperkirakan akan terus meningkat sehingga mempunyai daya saing di pasar global dengan melibatkan lembaga ekonomi masyarakat (koperasi).
- (3) Peningkatan perkebunan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
- (4) Mencipkan dan meumbuhkembangkan industry hilir dari bahan baku hasil olahan komoditas perkebunan.

c. Isu Strategis

- (1) Perlu adanya pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Perlu adanya pemantapan struktur perkebunan melalui pengelolaan dari hulu-hilir termasuk peningkatan mutu sumber daya manusia, diversifikasi produksi, penggunaan teknologi tepat guna baik dalam peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi dan diversifikasi hasil olahan.
- (3) Perlu adanya penguatan kerjasama dan keterkaitan antar bidang khususnya dengan peternakan untuk menghasilkan nilai tambah perkebunan.

2.2.8 Kehutanan

a. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi sumberdaya hutan yang cukup besar. Kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2006 seluas 43.335 ha berupa hutan rakyat dan 138.673 ha hutan negara. Luasan hutan ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi luasan hutan pada tahun 2004 seluas 23.813 ha dan 135.968. Meningkatnya luasan hutan ini mengindikasikan adanya penghutanan kembali tanah-tanah terlantar yang tidak diusahakan oleh masyarakat dan konservasi hutan untuk hutan lindung.

b. Perkiraan Masa Depan

Penataan ruang secara transparan, akomodatif, rasional dan konsisten merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan kehutanan dan non-kehutanan (agribisnis dan agroindustri) ke depan terutama dalam penetapan kawasan hutan tetap dan areal hutan yang dikonversi. Dalam 20 tahun mendatang, pengelolaan hasil hutan secara efisien dengan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan diperkirakan akan dapat meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui teknik silvikultur.

c. Isu Strategis

- (1) Perlu adanya pengelolaan sumber daya hutan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Perlu adanya pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan yang ada.
- (3) Perlu upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam jangka panjang.
- (4) Perlu adanya rehabilitasi dan pengayaan hutan dengan menerapkan penanaman dua jenis pohon, yaitu pohon yang tumbuh cepat dan pohon meranti unggulan lokal.
- (5) Perlu adanya upaya pemulihan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

2.2.9 Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

Pergeseran nilai-nilai budaya yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Rokan Hulu memberikan pengaruh signifikan bagi Budaya Melayu sebagai budaya lokal. Ini akibat pengaruh lalu lintas ekonomi dan lalu lintas etnik yang semakin menguat. Pergeseran nilai budaya ini juga sangat dipengaruhi terbukanya akses informasi melalui perkembangan teknologi informasi. Nilai-nilai kemelayuan yang terimplementasi dalam makanan, pakaian, adat perkawinan yang mencirikan khas Melayu Riau menjadi relatif mengecil di Kabupaten Rokan Hulu. Budaya Melayu yang diidentikan dengan Islam,

relatif belum memberikan determinasi positif terhadap aspek moralitas dan perilaku yang belum mencirikan penerapan nilai-nilai yang Islami. Pluralisme etnik di sebagian kawasan Kabupaten Rokan Hulu berpotensi terhadap terjadinya konflik sosial yang bersifat horizontal. Kebijakan nilai-nilai budaya Melayu sudah dimulai beberapa tahun lalu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui bangunan kantor, berpakaian melayu pada jam-jam kerja hari-hari tertentu, acara-acara nasional dan daerah tertentu, makanan melayu, adat istiadat dalam perkawinan, hari-hari besar Islam dan penerapan kurikulum lokal.

Kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam politik mulai semakin dewasa, misalnya dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kesadaran ini menguat dengan dipahaminya pluralitas dan kemajemukan sebagai penajaman demokratisasi di tingkat lokal. Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan perkembangan hingga saat ini menunjukkan stabilitas keamanan dan ketertibannya relatif baik. Kondisi tersebut menciptakan iklim yang kondusif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan. Dengan kehidupan beragama yang cukup religius, toleransi dan kerukunan yang relatif tinggi, semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang masih terjaga, budaya dan falsafah hidup masyarakat Melayu yang masih kental, tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang relatif belum ketat menjadikan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu relatif dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan dan potensi konflik yang berkembang di masyarakat.

Secara umum, kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat kondusif. Secara kuantitas, jumlah tempat peribadahan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan hari-hari besar agama juga dapat berjalan baik. Secara kualitas, kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tetap terjaga, kerukunan antar umat beragama juga relatif baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama.

c. Perkiraan Masa Depan.

- (1) Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terdapat ancaman berupa perubahan perilaku yang semakin permisif dan perubahan budaya yang semakin meninggalkan nilai-nilai luhur budaya Melayu jika tidak diantisipasi dengan baik akan mengalami degradasi nilai secara massif. Identitas kemelayuan yang melekat terhadap Kabupaten Rokan Hulu dapat semakin berkurang dan bahkan mungkin akan hilang. arus informasi, modal, tenaga kerja bisa mengancam eksistensi budaya lokal di Kabupaten Rokan Hulu. Ketidakstabilan politik nasional yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang dapat mengancam instabilitas politik di daerah.
- (2) Dalam 20 tahun mendatang, struktur penduduk menurut pemeluk agama di Kabupaten Rokan Hulu diperkirakan akan tetap. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, penyediaan fasilitas peribadatan dan pendidikan setiap agama diperkirakan akan juga meningkat termasuk musholla dan masjid, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, vihara dan pura.
- (3) Tantangan penerapan nilai-nilai Melayu yang Islami sesuai Visi Rokan Hulu 2020 yang masih bersifat abstrak, perlu diimplementasikan secara konkret melalui ketauladanan para pemimpin lokal yang dapat dijadikan sebagai contoh di setiap tingkatan, baik dalam kepemimpinan formal di jajaran birokrasi dan informal di masyarakat secara langsung. Tantangan pluralisme etnik di sebagian kawasan di Rokan Hulu yang berpotensi terjadinya konflik sosial bersifat horizontal, pemerintah perlu merumuskan sebuah kebijakan yang dapat memberikan kesadaran para tokoh etnis di Kabupaten Rokan Hulu.

d. Isu Strategis

- (1) Derasnya arus informasi dari luar dan budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat dapat melunturkan budaya kebersamaan dan gotong royong, rasa hormat pada orang lain, keimanan dan ketaqwaan, bahkan sebaliknya bisa menumbuhkan

individualisme, hedonisme dan pragmatisme, serta kemalasan dan sikap serba ingin *instant*.

- (2) Euforia kebebasan dan era reformasi telah membawa masyarakat kedalam kancah praktik politik dan kebebasan berpendapat yang tidak terarah dan tidak bertanggung jawab, serta merebaknya perilaku amoral dan asusila.
- (3) Perlu adanya peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antarpemeluk agama sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang semakin maju, bermutu dan bermartabat.
- (4) Budaya Melayu masih belum menjadi bagian kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

2.2.10 Prasarana dan Sarana

a. Kondisi Saat Ini

Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2005 adalah 1.620,48 km yang terdiri dari permulaan jalan yang diaspal 250,99 km (15,49 %), kerikil 1.170,90 km (72,26 %) dan tanah 204,09 km (12,59 %). Bila dilihat dari kondisi jalan Kabupaten sepanjang 649,04 km (40,24 %) dalam kondisi sedang 240,60 km (14,92%) dalam kondisi baik, dalam kondisi rusak sepanjang 562,70 km (34,89 %) sedangkan rusak berat sepanjang 160,63 km (9,96 %). Sedangkan panjang jalan propinsi di Kabupaten Rokan Hulu tercatat 347,27 km, dengan kondisi baik 258,40 km (74,41 %) kondisi sedang 47,33 km (13,62 %), rusak 39,54 km (11,38 %) dan rusak berat 2,00 km (0,57 %).

Transportasi umumnya dilakukan melalui angkutan darat. Pada tahun 2005 tercatat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut data dari dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu adalah terdiri dari kendaraan bus 126 buah, oplet 1 buah, pick up 833 buah, dan truck 2.119 buah. Jumlah sarana transportasi umum ini sesungguhnya masih teramat jauh dari cukup bila dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk. Akan tetapi dikarenakan tingkat kesejahteraan penduduk

masih rendah, maka frekwensi perjalanan merekapun masih relatif terbatas, sehingga kekurangan ini belum begitu dirasakan.

Pelayanan telekomunikasi pada saat ini dilayani oleh PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera, PT. Indosat, operator telekomunikasi selular oleh swasta, dan *rural radio* untuk kawasan perdesaan. Tingkat sambungan telepon kabel di Kabupaten Rokan Hulu masih sangat terbatas, yakni kurang dari 5 % dari rumah tangga. Pelayanan PT. Telkom didukung oleh *central gateway* di Pekanbaru, 24 STO di ibukota Kabupaten/Kota dan ibukota Kecamatan, transmisi gelombang mikro dan UHF, dan *repeaters*. Telekomunikasi internasional didukung oleh sentral gerbang internasional (SGI) 3 di Pulau Batam dan transmisi gelombang mikro yang mampu mengantisipasi kebutuhan Provinsi Riau hingga dua dekade mendatang. Kapasitas terpasang dan tersambung pada pusat perkotaan yang berpenduduk padat mencatat *occupancy rate* hingga 60%, sedang SST pada pusat-pusat ibukota Kabupaten baru relatif masih terbatas. Pengembangan prasarana telekomunikasi pada jangka panjang perlu mempertimbangkan peningkatan *occupancy rate* pada kota-kota yang telah berkembang; peningkatan SST dan pembangunan STO di kota-kota Kabupaten baru; dan perluasan jaringan STO berkapasitas kecil dan sedang menggunakan transmisi UHF dan *rural radio* di kawasan perdesaan yang dikembangkan secara terpadu dengan prasarana dan utilitas lainnya.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat daerah ini sebagian besar masih mengandalkan air tanah dangkal melalui, sumur gali (30%), air hujan (5%), sumur yang tidak terpelihara (40%), dan sisanya sungai, situ, dan pelayanan PDAM. Pelayanan air bersih perkotaan sangat terbatas, hanya mencapai 8% dan jumlah rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kota Pasir Pengarayan menjangkau sekitar 5 % dan jumlah rumah tangga yang ada.

b. Perkiraan masa depan

- (1) Pengembangan ekonomi wilayah yang akan lebih mengandalkan pertanian dalam arti luas memerlukan dukungan transportasi darat

yang menghubungkan pusat produksi pertanian dan pusat pemasaran di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

- (2) Penyediaan air bersih di pusat-pusat perdesaan dan sentra-sentra produksi sudah merupakan kebutuhan utama pula. Peran para pihak baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat dalam pengembangan prasarana air bersih perlu diperkuat dan disinergikan.
- (3) Penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana sosial bagi kebutuhan keagamaan sudah relatif memadai untuk ukuran standar pelayanan minimal. Akan tetapi di masa yang akan datang, peningkatan kualitas pelayanan sudah pasti menjadi tuntutan. Misalnya kebutuhan pendidikan dakwah, tilawah dan penafsiran Alqur'an sudah sangat dibutuhkan.

c. Isu-isu Strategis

- (1) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan, transportasi, kesehatan, listrik, air bersih, fasilitas umum dan sosial lainnya masih jauh dari mencukupi.
- (2) Belum tertatanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antarwilayah.
- (3) Belum optimalnya pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan.
- (4) Belum optimalnya pelayanan transportasi darat maupun sungai yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran.
- (5) Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2.11 Energi Listrik

a. Kondisi Saat ini

Listrik merupakan kebutuhan sekunder yang dirasakan sudah seperti kebutuhan primer pada saat ini. Krisis listrik secara nasional, dirasakan pula, bahkan lebih buruk di Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat ini energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Riau berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin dan PLTA Kota Panjang dan Sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166 Km dan Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1x10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2x50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kota kabupaten, kota kecamatan dan desa-desa yang belum terlayani oleh sistem interkoneksi. Akan tetapi kedua sistem ini masih sangat jauh dari kuantitas mencukupi kebutuhan listrik masyarakat setempat.

Rasio elektrifikasi Provinsi Riau tercatat sebesar 38 % atau lebih rendah dan rata-rata Nasional sebesar 57%. Di Kabupaten Rokan Hulu angka ini masih lebih rendah, yaitu baru sekitar 25 %. Di samping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanannya juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas juga menghadapi kendala, terutama warga perdesaan.

b. Perkiraan Masa Depan

(1) Pada jangka panjang penyediaan listrik dan sumber-sumber energi lainnya yang diperlukan oleh industri dan domestik perlu diupayakan dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber listrik dan energi, skala pelayanan dan efisiensi pembangkit dan transmisinya. Alternatif yang dapat dikembangkan selain PLTA adalah pembangunan PLTG dan PLTU dengan memanfaatkan aliran Sungai Rokan Kiri dan Rokan Kanan, sumber gas alam dan batubara. Sedangkan sumber energi untuk bahan bakar dan perkotaan selain BBM perlu mempertimbangkan pemanfaatan energi gas dan bahan-bahan nabati.

- (2) Dalam waktu dua puluh tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya investasi dan berkembangnya kegiatan ekonomi daerah terutama industri dan perdagangan, kebutuhan listrik diperkirakan akan terus meningkat. Pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga diesel, dan dalam jangka panjang perlu didukung dengan pembangkit listrik lainnya.

c. Isu Strategis

- (1) Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan.
- (3) Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik.
- (4) Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.

2.2.12 Pemerintahan

a. Kondisi Saat Ini

Jumlah aparatur pemerintahan cukup memadai guna menjalankan fungsi pelayanan publik, baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan. Namun masih perlu penambahan secara bertahap setiap tahunnya. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kapasitas intelektual masih lemah, karena pegawai terbanyak hanya tamatan SLTA. Dari aspek kompetensi dan profesional juga masih lemah, karena masih terbatasnya jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan. Dari aspek integritas, kelemahannya berhubungan dengan cara pandang pegawai yang keliru dalam memahami dan mengaplikasikan paradigma birokrasi pemerintahan itu sendiri, sehingga menyebabkan menurunnya citra aparatur dan wibawa pemerintah.

Prasarana dan sarana penunjang penyelenggaraan tanggungjawab pelayanan umum. Penyelenggaraan tanggungjawab pelayanan umum belum seluruhnya ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai,

terutama pada penyelenggaraan di tingkat pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. Permasalahan prasarana antara lain berhubungan dengan persoalan jalan, listrik, air bersih, komunikasi, dan teknologi (IT). Permasalahan sarana antara lain berhubungan dengan persoalan gedung/kantor dan perlengkapan kantor.

Sikap responsif terhadap tingkat kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui penjangkauan aspirasi dan informasi (tuntutan, keinginan, kemauan, kebutuhan, harapan), sebagai bahan baku (input) di dalam kegiatan/tahap perencanaan pemerintahan, sehingga program-program pembangunan yang dilakukan memiliki dampak yang luas terhadap keterlibatan dan peran serta masyarakat. Dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan dan terbukanya lapangan kerja baru.

b. Perkiraan Masa Depan

Tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan. Era globalisasi dan kesiapan pemerintah daerah menghadapi era tersebut merupakan tantangan utama ke depan yang dihadapi pemerintah daerah Rokan Hulu. Bila pemerintah daerah siap menghadapinya, maka globalisasi akan menguntungkan bagi pembangunan daerah. Bila sebaliknya, maka globalisasi merupakan mimpi buruk bagi pemerintah daerah. Siap atau tidaknya pemerintah daerah berhadapan dengan globalisasi ditentukan dari kesediaan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dan orientasi pelayanan publik.

Menuju pembangunan masa depan tersebut, perlu diupayakan pemantapan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah Rokan Hulu sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah; perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik; serta penegakan supremasi hukum dan HAM dalam pelayanan umum.

c. Isu-isu Strategis

(1) Situasi dan undang-undang, peraturan dan perkembangan politik secara nasional berpengaruh pula pada keharmonisan hubungan

dan kerjasama lembaga pemerintahan eksekutif dengan legislatif, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya peran kedua belah pihak.

- (2) Pola rekrutmen aparatur pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif) belum mampu secara maksimal menyaring personal yang profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga peran pemerintah daerahpun tidak terlaksanakan secara maksimal.
- (3) Kualitas sumberdaya manusia apatur pemerintahan belum pula maksimal, sehingga kinerja yang diberikan tidak pula maksimal.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan Kabupaten Rokan Hulu sebagai bagian dari Propinsi Riau dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, modal dasar pembangunan yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu meliputi 5 (lima) modal yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sumber Daya Sosial, Sumber Daya Buatan, dan Komitmen dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pembangunan. Modal dasar tersebut akan didayagunakan secara optimal dalam pembangunan daerah demi tercapainya kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

1. Sumber Daya Manusia

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Kabupaten Rokan Hulu mempunyai penduduk sebanyak 360.992 jiwa (2005). Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang adil dan sejahtera. Wujud daerah tersebut, selain merupakan harapan tetapi juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras.

2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga sumber daya alam seperti bahan tambang galian dan sumber daya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.

3. Sumber Daya Sosial

Modal sosial tidak dapat dilepaskan dari akar budaya yang terbentuk dari tradisi yang bersumber kepada kearifan lokal dan agama. Agama dan budaya merupakan fondasi dari semua aspek kehidupan masyarakat dan juga merupakan faktor pendorong utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Budaya ekonomi yang adil, efisien dan transparan yang melekat pada semua elemen pemerintahan, para pelaku ekonomi dan masyarakat dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah agar semakin maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Budaya transparan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat daerah dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan rakyat melalui pendidikan politik yang demokratis sehingga proses demokratisasi yang sedang berlangsung tidak kebablasan. Kepercayaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan warisan modal sosial dari leluhur yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal dasar dalam melaksanakan pembangunan.

4. Sumber Daya Buatan

Modal fisik/infrastruktur baik infrastruktur ekonomi maupun sosial merupakan sistem pendukung yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Jumlah, mutu dan kemudahan akses terhadap infrastruktur akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara material maupun non material.

5. Komitmen dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pembangunan

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang disertai dengan pencanangan kebijakan otonomi daerah era baru, telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut juga akan mempengaruhi pembangunan politik di daerah. Kondisi politik di Kabupaten Rokan Hulu senantiasa dalam kondisi yang dinamis namun tetap kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sifat masyarakat Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sangat kental tercermin dalam perilaku kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, dapat menjadi modal dasar dalam mendasari kehidupan politik daerah untuk selalu berkomitmen dan berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan.

BAB III

VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

3.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi Kabupaten Rokan Hulu saat ini, tantangan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan; serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Dilandasi Imtaq dan Iptek Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Agribisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya”

Kesejahteraan Masyarakat, yaitu suatu keadaan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin serta material spiritual. Dalam kondisi tersebut juga telah terpenuhi tuntutan minimal adanya standar kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, memiliki derajat kesehatan yang prima, tersedianya sarana pendidikan, serta suasana masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam lingkungan yang memberi rasa aman.

Imtaq dan Iptek, masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang agamis, yang dalam menjalani kehidupannya akan selalu berlandaskan pada norma agama, moral, adat istiadat dan etika serta tetap berpegang teguh pada kejujuran yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsanya sendiri, berdasarkan aspirasi

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad untuk selalu berupaya mengemban amanah masyarakat.

Agribisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan, pengelolaan agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya bidang pertanian selalu mengikutsertakan, memberdayakan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat sejahtera dimana kehidupan ekonomi kerakyatan, baik usaha kecil maupun menengah dan koperasi menjadi usaha yang mandiri dan handal, mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan mempunyai daya saing tinggi sehingga tetap eksis dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Usaha berskala besar berkembang berdampingan sejajar dengan usaha kecil melalui pemitraan dan bersinergi.

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya, Disamping agribisnis, mengupayakan sektor-sektor usaha yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam lainnya yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam lainnya yang berwawasan lingkungan agar dapat berkembang dan memberikan peluang kerja/usaha bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga dapat diwujudkan tersedianya sumber daya manusia yang profesional sebagai penggerak pembangunan sekaligus pelaku ekonomi yang handal, mampu menyerap dan memanfaatkan teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang ada.

3.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rokan Hulu yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- 5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

3.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sasaran

Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rokan Hulu yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut :
 - (a) Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqwa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
 - (b) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
 - (c) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
 - (d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
 - (e) Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang mandiri, berdaya saing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (f) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.

- (g) Makin mantapnya budaya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
 - (h) Terlaksananya sistem jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang terpadu, efisien dan efektif.
- (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal ditandai oleh hal-hal berikut :
- (a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Rokan Hulu semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.
 - (b) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (c) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (d) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.
- (3) Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut :
- (a) Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Rokan Hulu yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.
 - (b) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan.
 - (c) Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 - (d) Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, permukiman dan fasilitas umum

- (e) Terwujudnya efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi
- (4) Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif ditandai oleh hal-hal berikut :
- (a) Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggung jawab.
 - (b) Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
 - (c) Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
 - (d) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.
- (5) Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut :
- (a) Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu termasuk wilayah perdesaan.
 - (b) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
 - (c) Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - (d) Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.

- (e) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

4.1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hulu Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Berakhlak Mulia

1. Pendidikan

Strategi 1: Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah pedesaan.

Arah Kebijakan :

- a. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar;
- d. Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.

Strategi 2 : Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kecamatan;
- b. Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU yang mampu bersaing di pasar global;
- c. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;

- d. Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional.

Strategi 3 : Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal setingkat perguruan tinggi yang bermutu.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja;
- b. Pengembangan lembaga pendidikan tinggi dengan standar nasional;
- c. Pengembangan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus;
- d. Pengembangan pusat pelatihan yang memiliki standar nasional.

2. Kesehatan

Strategi 1 : Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup.

Arah Kebijakan :

- a. Promosi cara hidup sehat;
- b. Peningkatan kemitraan antara tenaga medis dan non medis;
- c. Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga;
- d. Pengadaan desa siaga dengan meningkatkan implementasi kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia.

Strategi 2 : Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan;
- b. Pengembangan informasi kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui.

Strategi 3 : Peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah sejak dini dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan *hygiene* sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya;
- b. Peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit;
- c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat.

Strategi 4 : Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja, dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
- b. Peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan seperti santun lansia;
- c. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah melalui berbagai program subsidi;
- d. Peningkatan gizi masyarakat yang mendukung tercapainya sumber daya manusia yang bermutu.

Strategi 5 : Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap Kecamatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan.

Arah Kebijakan :

- a. Pemantapan kerjasama lintas program dan sektor yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
- b. Pemantapan akreditasi fasilitas kesehatan;
- c. Pemantapan mutu dan perluasan jangkauan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan terutama pada wilayah perdesaan dan kawasan rawan bencana;

- d. Penambahan fasilitas pendidikan yang dapat menciptakan tenaga kesehatan.

Strategi 6 : Peningkatan dan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan mutu sumber daya dengan meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan meningkatkan profesionalisme;
- c. Peningkatan jumlah tenaga medis, spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan;
- d. Peningkatan tenaga medis sampai ke pelosok perdesaan.

Strategi 7 : Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera.

Arah Kebijakan :

- a. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Peningkatan pemahaman pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi;
- c. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- d. Pembinaan kemandirian, peningkatan cakupan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi;
- e. Pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan remaja, maupun KB mandiri;
- f. Peningkatan sosialisasi program keluarga berencana sampai perdesaan;
- g. Pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian.

3. Kependudukan

Strategi 1 : Penurunan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan dan pengembangan keluarga sejahtera;
- b. Peningkatan mutu kesehatan reproduksi;
- c. Pembangunan berwawasan jender.

Strategi 2 : Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.

Arah Kebijakan :

- a. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan;
- b. Penyediaan jaringan transportasi di wilayah perdesaan;
- c. Pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan.

Strategi 3 : Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis internet.

Arah Kebijakan :

- a. Penataan pencatatan dan administrasi kependudukan;
- b. Pengembangan sistem informasi dan database kependudukan.

4. Ketenagakerjaan

Strategi 1 : Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peluang berusaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;
- b. Peningkatan ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik;
- c. Peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan manajemen sistem tenaga kerja.

Strategi 2 : Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

Arah Kebijakan :

- a. Revitalisasi tenaga kerja;
- b. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja berdasarkan bidang keahlian;

- c. Pengadaan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja).

Strategi 3 : Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja di dunia usaha khususnya bagi tenaga berkecakupan rendah dan menengah;
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja yang berorientasi pemenuhan kualitas tenaga kerja dan pasar kerja;
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja;
- d. Perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan, khususnya hubungan antara industri dengan para pekerjanya;
- e. Penghapusan tenaga kerja anak.

Strategi 4 : Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran dan kualitas *stakeholders* dalam perlindungan tenaga kerja;
- b. Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- c. Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Strategi 1 : Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan;
- b. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian berbagai bidang.

Strategi 2 : Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan berdasarkan IPTEK sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna;
- b. Penyebarluasan hasil penelitian pada masyarakat.

Strategi 3 : Pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha dan perguruan tinggi kepada masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Mengalokasikan dalam bentuk insentif untuk mengembangkan motivasi masyarakat dan lembaga non litbang.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK di setiap bidang pembangunan

Strategi 4 : Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penelitian pembangunan;
- b. Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

6. Perempuan dan Anak

Strategi 1 : Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

- b. Perluasan kesempatan yang lebih luas pada kaum perempuan dalam berkarir dan berkarya;
- c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumber daya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita;
- d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. Peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

7. Pemuda dan Olah raga

Strategi 1 : Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan fungsi, peran serta kegiatan lembaga dan organisasi kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda sehingga mampu mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan;
- b. Pembinaan generasi muda untuk meningkatkan dinamika kepemudaan dan kepemimpinan;
- c. Pembinaan pengembangan seni dan budaya.

Strategi 2 : Peningkatan prestasi olahraga masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga;
- b. Peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) dan kelembagaan olah raga pada berbagai instansi dan organisasi kepemudaan serta wilayah.

8. Agama

Strategi 1 : Peningkatan pelayanan kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing;
- b. Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan.

Strategi 2 : Peningkatan pemahaman dan pengalaman agama bagi setiap individu dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan;
- c. Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang agama.

Strategi 3 : Peningkatan dan memantapkan kerukunan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama para pemeluk agama sehingga dapat berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kerukunan antar umat beragama;
- b. Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama;
- c. Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

9. Kesejahteraan Sosial

Strategi 1 : Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat;
- b. Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin dan membekali keterampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya;

- c. Pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- d. Peningkatan sumber daya manusia pengelola kesejahteraan sosial;
- e. Perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tuna susila dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya.

10. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Strategi 1 : Peningkatan kapasitas pemerintah desa/ kelurahan

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan;
- b. Peningkatan pembinaan aparat pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.

Strategi 2 : Peningkatan kapasitas Badan Perwakilan Desa/Kelurahan (BPD/K).

Arah Kebijakan :

- a. Optimalisasi fungsi Badan Perwakilan Desa/Kelurahan;
- b. Optimalisasi fungsi legislasi Badan Perwakilan Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan.

Strategi 3 : Peningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan dan kelurahan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat di perdesaan dan kelurahan;
- b. Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat;

Strategi 4 : Peningkatan peran, partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

Strategi 5 : Peningkatan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat secara dinamis

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lokal;
- b. Pengembangan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan.

Strategi 6 : Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran lembaga ekonomi di pedesaan dan kelurahan;
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
- c. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.

Strategi 7 : Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan;
- c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui hasil penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.

Strategi 8 : Peningkatkan kapasitas tata ruang pedesaan dan kelurahan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan penataan infrastruktur pedesaan dan kelurahan;
- b. Peningkatan kualitas dan penataan permukiman masyarakat pedesaan dan kelurahan.

4.2 Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.

1. Perekonomian Daerah

Strategi 1 : Perubahan struktur ekonom dari keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi berbasis berkeunggulan kompetitif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguatan industri pengolahan sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, serta pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara modern dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran sektor pertanian yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja;
- b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan;
- c. Peningkatan investasi dan perdagangan khususnya diluar sektor migas;
- d. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM);
- e. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi;
- f. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial.

Strategi 2 : Penguatan daya saing perekonomian bertumpu pada penguatan sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif dengan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dan manajerial;
- b. Peningkatan akses informasi pasar internasional;
- c. Peningkatan standar mutu produk unggulan yang berbasis ekspor;

- d. Perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan

2. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Strategi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan manajemen usaha tani.

Arah Kebijakan:

- a. Perluasan kesempatan yang sama kepada semua Pegawai dan Petani/Kelompok Tani mengikuti Diklat, Kursus, Sekolah Lapang, Studi Banding, Pelatihan dan lain-lain bagi yang memenuhi syarat.
- b. Peningkatan peran serta secara langsung masyarakat lokal dalam penggunaan teknologi tepat guna dan diversifikasi pertanian.

Strategi 2 : Peningkatan indeks pertanaman bagi daerah-daerah sentra pembangunan pertanian dan peningkatan efisiensi lahan melalui diversifikasi pertanian serta perluasan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan.

Arah Kebijakan :

- a. Pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-alat produksi pertanian;
- b. Pengembangan teknologi bidang pertanian dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

Strategi 3 : Pengembangan kawasan pertanian dan pedesaan melalui pengembangan agropolitan dengan pengembangan jaringan infrastruktur antara sentra pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi);
- b. Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis;
- c. Peningkatan teknologi tepat guna pada kawasan sentra-sentra pertanian potensial.

Strategi 4 : Pengembangan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan pendekatan keterpaduan antara sub sistem hulu dan hilir.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam;
- b. Perlindungan lahan subur, khususnya sawah S1 dari alih fungsi lahan non-pertanian;
- c. Pemantapan pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi dipasaran hingga dapat mencapai pasar luar negeri;
- d. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai usaha mencapai kesejahteraan di Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Penjaminan ketersediaan pangan dalam rangka untuk menunjang ketahanan pangan;
- f. Optimalisasi peran serta lembaga-lembaga pertanian dan pengembangan kebijakan yang berpihak pada petani;

3. Perkebunan

Strategi 1 : Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran masyarakat lokal dalam upaya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar;
- b. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan investasi;
- c. Penyediaan lahan perkebunan disertai dengan berbagai kemudahan dalam pengurusan izin untuk pengembangan lahan;
- d. Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan daerah potensi disekitarnya;

- e. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan;
- f. Pengembangan perkebunan secara terintegrasi dengan peternakan dan pertanian serta industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi nilai lahan perkebunan;
- g. Pemanfaatan hasil perkebunan untuk kepentingan sektor lain seperti peternakan dan industri.

Strategi 2 : Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomi tinggi.

Arah Kebijakan :

- a. Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah/digunakan sebagai pengembangan perkebunan yang lebih produktif dan intensif;
- b. Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya;
- c. Penetapan peraturan terkait yang mengatur secara jelas mengenai jenis dan kriteria peruntukan lahan perkebunan dan pengelolaannya;
- d. Penetapan deregulasi yang menjamin kesejahteraan perangkat di bidang perkebunan.

Strategi 3 : Peningkatan mutu dan kualitas produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pada bidang perkebunan, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan);
- b. Penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan;
- c. Pengelolaan komoditi perkebunan potensial melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).

4. Kehutanan

Strategi 1 : Penjaminan keberadaan sumber daya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem.

Arah Kebijakan :

- a. Pemberantasan pembalakan ilegal (*illegal logging*);
- b. Penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan;
- c. Pemantapan kawasan hutan;
- d. Perlindungan hutan adat;
- e. Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan;
- f. Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.

Strategi 2 : Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

Arah Kebijakan :

- a. Percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya;
- c. Revitalisasi sektor kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu;
- d. Peningkatan reboisasi hutan, HTI, dan penanaman kembali hasil hutan.

Strategi 3 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang diimbangi dengan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia;
- b. Penciptaan industri yang efisien dan berdaya saing global serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.

5. Peternakan

Strategi 1 : Pengembangan peternakan sehingga menjadi komoditas ekspor.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan ternak yang telah menjadi andalan dan unggulan;
- b. Penciptaan kondisi atau iklim usaha yang sehat;
- c. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan, baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam lokal bidang peternakan.

Strategi 2 : Peningkatan nilai tambah peternakan dengan melakukan peningkatan produksi hasil pengolahan produk peternakan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan sumber daya manusia peternakan, baik petani ternak maupun petugas teknis melalui peningkatan keterampilan teknologi pengelolaan hasil produk peternakan;
- b. Pengembangan teknologi pengolahan hasil peternakan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan.

Strategi 3 : Perluasan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan petani ternak untuk memasarkan produk peternakan.

Arah Kebijakan :

- a. Pembangunan sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan, seperti adanya pasar hewan di setiap kecamatan;
- b. Pemberian kemudahan ijin untuk memasarkan produk peternakan ke luar daerah maupun luar negeri.

Strategi 4 : Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan usaha peternakan dengan skala ekonomis;
- b. Pembangunan sistem informasi teknologi dan pemasaran yang menjangkau seluruh kecamatan;
- c. Peningkatan kemampuan peternak mengakses permodalan dengan skim kredit lunak dan kemitraan.

Strategi 5 : Peningkatan sumber daya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan;
- b. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana peternakan untuk meningkatkan perkembangan agribisnis dan agroindustri bidang peternakan;
- c. Peningkatan sumber daya manusia peternakan di bidang teknologi pengembangan kewirausahaan peternakan, pengolahan dan pemasaran.

Strategi 6 : Pengembangan peternakan yang tangguh dengan sistem agribisnis berbasis sumber daya lokal

Arah Kebijakan :

- a. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan daging ternak dan telur;
- b. Penciptaan suasana yang kondusif dan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang peternakan;
- c. Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam lokal yang mendukung pembangunan peternakan;
- d. Pemanfaatan lahan dan hasil pertanian dan perkebunan untuk pengembangan ternak yang saling menguntungkan.

6. Perikanan

Strategi 1b: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders bidang perikanan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi seluruh stakeholders perikanan;
- b. Pengembangan pendidikan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang profesional.

Strategi 2 : Pengembangan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal pembudidaya ikan.

Arah Kebijakan :

- a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga ekonomi masyarakat;
- b. Pemberian kemudahan izin usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan.

Strategi 3 : Pengembangan berbagai komoditas perikanan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar.

Arah Kebijakan :

- a. Diversifikasi pengolahan hasil perikanan
- b. Pengembangan produksi olahan sebagai produk unggulan

Strategi 4: Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan standarisasi perikanan;
- b. Peningkatan promosi perikanan;
- c. Pengawasan penggunaan bahan pengawet produk perikanan;
- d. Penggunaan teknologi unggulan perikanan.

7. Investasi daerah

Strategi 1 : Peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN/PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Penjaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha;
- b. Penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai deregulasi dan sistem insentif;
- c. Peningkatan dan pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal;

- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial;
- f. Penyiapan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus untuk merangsang minat investasi;

Strategi 2 : Peningkatan pendapatan dari penerimaan PAD dalam upaya mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan kemampuan usaha BUMD;
- b. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Peningkatan kemampuan aparatur khususnya dalam manajemen keuangan dan aset daerah;
- d. Pengembangan kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya dalam membuka peluang usaha dan penggalan sumber PAD;
- e. Peningkatan kemudahan dalam berinvestasi;
- f. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMD.

8. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

1). Perindustrian

Strategi 1 : Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumber daya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus Indonesia sebagai upaya perwujudan pembentukan struktur industri yang mapan mulai dari industri hulu sampai hilir;
- b. Pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui keberkaitan antar sektor potensial.

Strategi 2 : Peningkatan daya saing industri dan keberlanjutan industri

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri;
- c. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.

2). Perdagangan

Strategi 1 : Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan perekonomian wilayah

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis produk unggulan daerah;
- c. Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Strategi 2 : Peningkatan kerjasama perdagangan regional dan internasional

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Pengembangan perdagangan lintas sektor, regional, dan internasional;
- c. Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional;
- d. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Strategi 3 : Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kelancaran distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan;
- c. Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.

3). Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Strategi 1 : Pemberian peran yang lebih besar pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang mampu mengangkat citra perekonomian kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a. Pembinaan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan dengan melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, melalui ekonomi produktif;
- b. Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. Pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi pedesaan baik pada daerah sekitar hutan, yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja;
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses terhadap aktivitas ekonomi;
- e. Peningkatan fasilitas pelayanan aktivitas usaha melalui penyederhanaan prosedur dan penyederhanaan sistem tata niaga.

Strategi 2 : Pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi sebagai basis pengembangan industri regional dan penyerapan tenaga kerja.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan desa kerajinan yang potensial untuk menghasilkan produk unggulan;
- b. Pengembangan kerjasama dengan industri terkait dan industri penunjang;
- c. Peningkatan akses pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar.

9. Pariwisata

Strategi 1 : Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan keterkaitan antar semua perangkat di sektor kepariwisataan dalam lingkup Nasional;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta Infrastruktur kepariwisataan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian;
- d. Pengembangan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- e. Pengembangan sistem paket wisata integratif dengan kepastian jadwal;
- f. Peningkatan komunikasi antar perangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Strategi 2 : Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensial;
- b. Peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promosi wisata dan berbagai pintu masuk wisata;
- c. Peningkatan komunikasi antar perangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang menangani promosi wisata.

Strategi 3 : Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan.

Arah Kebijakan :

- a. Penetapan obyek wisata yang memiliki nilai spesifik dan unik yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan;
- b. Pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensial dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event nasional dan Internasional.

Strategi 4 : Pengembangan Industri wisata.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan sumber daya manusia pada keahlian bidang kesenian budaya dan kerajinan tangan;
- b. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata.

Strategi 5 : Pengembangan jalur wisata yang efisien dan menarik.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan jalur wisata unggulan;
- b. Pengadaan infrastruktur pada daerah persinggahan jalur wisata pada wisata unggulan dan potensial.

10. Pertambangan

Strategi 1 : Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan :

- a. Pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang.

4.3 Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat secara Merata dan Proporsional

1. Transportasi Darat

Strategi 1 : Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan perdesaan;
- b. Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan;
- c. Peningkatan kelas jalan utama yang menghubungkan dalam dan luar wilayah serta pada pusat-pusat aktivitas.

Strategi 2 : Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan prasarana transportasi di daerah yang mempunyai angkutan perjalanan tinggi;
- b. Peningkatan keterkaitan transportasi intermoda yang berhubungan antara daratan;
- c. Penyediaan sarana transportasi yang memadai untuk angkutan yang mendukung komoditas unggulan.

Strategi 3 : Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terhadap pembentukan kawasan strategis daerah sehingga terjadi keterpaduan yang saling mendukung.

Arah Kebijakan :

- a. Pembangunan jalan baru yang mengarah pada akses ke kawasan strategis daerah;
- b. Peningkatan aksesibilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa;
- c. Peningkatan kualitas jalan pada kawasan perdesaan.

- d. Pembangunan sarana dan prasarana jalan, taman median jalan.
- e. Sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

2. Transportasi Udara

Strategi 1 : Peningkatan kualitas system transportasi udara untuk keperluan pergerakan nasional, maupun pergerakan local.

Arah Kebijakan :

- a. Pemanfaatan system hirarki jaringan transportasi udara sesuai dengan tingkat kebutuhan dan rencana pengembangan yang mendukung terhadap tingkat cakupan pergerakan dan wilayah pelayanan.
- b. Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi udara pada kawasan yang tingkat aktivitasnya tinggi.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.
- d. Peningkatan keselamatan penerbangan.

Strategi 2 : Peningkatan pelayanan bandara perintis menjadi lebih tinggi lagi sehingga aksesibilitas dapat terjangkau.

Arah Kebijakan :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana bandara perintis yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada
- b. Peningkatan bandara perintis menjadi bandara yang mempunyai tingkat layanan dan jangkauan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan rencana pengembangan wilayah.

3. Pengairan

Strategi 1 : Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/ bendungan;
- b. Pengembangan embung pada lokasi strategis;

- c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- d. Pencetakan sawah baru pada lokasi potensial.

Strategi 2 : Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Arah Kebijakan :

- c. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung pengendali banjir;
- d. Pengembangan bendung/embung pada lokasi yang strategis;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Strategi 3 : Pengembangan sumber air baku (penyediaan air baku untuk air bersih).

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung sebagai sumber air baku;
- b. Pengembangan dan pengelolaan bendung/embung sebagai sumber air baku.

Strategi 4 : Konservasi sumberdaya air.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui GUKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air);
- b. Peningkatan pengamanan sungai.

4. Energi Listrik

Strategi 1 : Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak;

- b. Penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD untuk penyediaan jangka pendek, maupun melalui penyediaan mikro hidro dan mini hidro;
- c. Penyediaan listrik pedesaan berupa PLTS atau pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai sebagai upaya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah;
- d. Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan.

Strategi 2 : Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pengawasan dan pemahaman terhadap penggunaan listrik di masyarakat;
- b. Peningkatan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya *losses* tenaga listrik;
- c. Pengembangan inter koneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka untuk penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak;
- d. Penyediaan pembangkit listrik baru pada kawasan baru.

4.4 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif

1. Politik dan Pemerintahan

Strategi 1 : Peningkatan pembangunan aparatur daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kompetensi;
- c. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business dan cyber law* untuk pelayanan publik yang prima.
- d. Perbaiki sistem rekrutmen;

- e. Pengembangan sistem pengawasan serta peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- f. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja.

Strategi 2 : Peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis.

Arah Kebijakan :

- a. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan;
- b. Peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional berbasis *good governance* dengan melibatkan dunia swasta dan partisipasi masyarakat melalui pembuatan Perda inisiatif yang dihasilkan DPRD.

Strategi 3 : Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai;
- c. Pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan (e-government) sampai di tingkat kecamatan dan desa;
- d. Peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi segenap aparatur pemerintah;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem pengawasan;

Strategi 4 : Peningkatan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama serta penyediaan badan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kerjasama baik antar pemerintah dengan swasta maupun masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan publik;
- b. Pembentukan badan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama;

- c. Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja;
- d. Standarisasi akuntabilitas anggaran publik dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e. Peningkatan koordinasi lintas sektoral ditunjang dengan regulasi yang memadai guna memantapkan program-program pembangunan.

2. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Strategi 1 : Pengembangan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik agar mantapnya interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur stabilitas politik serta sosial budaya dalam wilayah NKRI.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah;
- b. Pengembangan etika, moral dan budaya politik yang demokratis;
- c. Peningkatan kualitas integrasi sosial budaya melalui peningkatan kelembagaan sosial budaya, perbaikan perilaku yang menyimpang dan pengembangan sumber daya pranata sosial.

Strategi 2 : Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional mandiri, independen dan non partisan.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sistem dan mekanisme pemilu yang demokratis langsung;
- b. Peningkatan kemandirian Orpol, Ormas dan LSM;
- c. Percepatan pengembangan pendidikan politik.

Strategi 3: Pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral Pancasila.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan dan penguatan ketahanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan;

- b. Peningkatan pemahaman dan pengembangan konsep, metode dan materi sosial wawasan kebangsaan;
- c. Pengembangan sistem, metode dan materi serta peningkatan kewaspadaan.

Strategi 4 : Pemantapan pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan upaya pembauran bangsa dalam mewujudkan integrasi;
- b. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Strategi 5 : Peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman dan gangguan hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa;
- b. Pengembangan pendidikan, kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa dan berwawasan nusantara.

Strategi 6 : Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bahaya bencana.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sistem perlindungan masyarakat/pertahanan sipil dalam rangka Sishankamrata;
- b. Penyusunan sistem informasi dan kesiapsiagaan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat.

Strategi 7 : Peningkatan kapasitas aparaturnya Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;
- b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur kesbangpol.

3. Hukum

Strategi 1 : Peningkatan kuantitas dan kualitas organisasi perangkat hukum serta pengembangan struktur organisasi setingkat Muspida di wilayah kecamatan.

Arah Kebijakan :

- a. Penjaminan terhadap kepastian, keadilan dan penegakan hukum serta meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah aparat hukum di daerah rawan termasuk peningkatan pembinaan melalui diklat aparat.

Strategi 2 : Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat hukum melalui pembinaan dan pendidikan serta latihan aparat hukum.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum dalam merealisasikan pembentukan badan kerja sama guna menekan angka kriminalitas;
- b. Penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum.

Strategi 3 : Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum guna memfasilitasi penyediaan regulasi dan pembentukan badan kerja sama atau forum-forum penegakan hukum.

Arah Kebijakan :

Pembentukan forum koordinasi dan komunitas secara terpadu antar organisasi perangkat hukum dengan organisasi kekuatan sosial politik di masyarakat agar terjadi penanganan secara cepat dalam rangka penegakan hukum guna menangkal potensi gangguan Kamtibmas di masa yang akan datang.

Strategi 4 : Peningkatan pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Pencegahan, penindakan tindak pidana korupsi serta monitoring dan evaluasi.

Strategi 5 : Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi dan keterlibatan relawan dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hukum, pelaksanaan hukum, serta monitoring, evaluasi, dan penanganan sengketa hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum;
- b. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program penyuluhan kesadaran hukum.

Strategi 6 : Peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas dalam menindak setiap perkara kejahatan, baik pidana maupun perdana secara adil, transparan dan akuntabel;
- b. Penuntasan penanganan kasus-kasus menonjol seperti narkoba, illegal logging, illegal worker, dan trafficking;
- c. Pengembangan pos pemantau terpadu di setiap daerah rawan tindak kejahatan;

Strategi 7 : Peningkatan kuantitas dan kualitas kebijakan hukum (Perda inisiatif DPRD).

Arah Kebijakan :

Perumusan Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD, sebagai indikator peningkatan kualitas lembaga legislatif dalam proses kebijakan publik di daerah.

4.5 Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi Dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi

1. Penataan Ruang

Strategi 1 : Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal;
- b. Percepatan pemerataan antar wilayah dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana terutama pada daerah yang diprioritaskan;
- c. Peningkatan pertumbuhan wilayah secara adil dan merata dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang baru;
- d. Pengembangan kawasan strategis skala kabupaten dan kecamatan berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan sentra produksi;
- e. Penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah;
- f. Penataan ruang melalui kegiatan : perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif.

Strategi 2 : Peningkatan interaksi pemasaran kota kecil.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat investasi pada daerah tertinggal;
- b. Pengembangan transportasi antar wilayah yang mendukung sektor prioritas atau unggulan;

Strategi 3 : Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pelayanan aksesibilitas pada pusat kegiatan khususnya kawasan strategis;

- b. Pengintegrasian berbagai program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan berbasis tata ruang wilayah;
- c. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus.

Strategi 4 : Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan;
- c. Pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah;
- d. Pemanfaatan ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan tetap mendukung keseimbangan ekologis.

2. Perumahan dan Pemukiman

Strategi 1 : Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta.

Arah Kebijakan :

- a. Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur dasar yang memadai;
- b. Pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan pemukiman;
- d. Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.

3. Permukiman Transmigrasi

Strategi 1 : Penyediaan hunian yang layak huni untuk transmigran.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan perumahan dan tanah untuk usaha yang memadai bagi transmigran;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan kegiatan usaha masyarakat;
- c. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan;

Strategi 2 : Peningkatan kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi.

Arah kebijakan :

- a. Penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi sesuai standar minimum;
- b. Pemilihan komoditas yang memiliki ekonomi tinggi;
- c. Pengembangan investasi berbasis agroindustri dan agrobisnis.

Strategi 3 : Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dengan pusat pemasaran;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman;
- c. Pengembangan usaha-usaha baru di masyarakat lokal.

4. Lingkungan Hidup

Strategi 1 : Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam rangka penanganan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya;

- c. Penetapan perangkat hukum dalam penegakan lingkungan hidup;
- d. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, serta fauna dan flora spesifik yang ada.

Strategi 2 : Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan :

- a. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama untuk melindungi hewan dan tanaman langka;
- b. Peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup;
- c. Peningkatan pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam;
- d. Penataan area bekas penambangan dan penebangan hutan, atau perubahan lainnya yang berpotensi merusak alam menjadi lebih bernilai tambah;
- e. Pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan hutan;
- f. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas.

Strategi 3 : Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
- b. Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai dengan fungsi kawasan;
- c. Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. Peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah;
- f. Perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air;
- g. Pengelolaan pengendalian banjir.

BAB V

SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka panjang daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah. Selain itu, tahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

5.1 Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah

5.1.1 Skenario Pembangunan Wilayah

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar kecamatan; pertumbuhan seimbang antara kota kecil dan wilayah *hinterlandnya*; pengembangan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan.

Penataan Ruang

Penetapan fungsi dan peran setiap kecamatan ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (1) jangkauan transportasi utama termasuk pelabuhan, terminal, dan bandar udara yang dapat mendukung mobilitas sumber daya dan komoditas; (2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana; (3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir; (4) keunggulan komparatif setiap kecamatan; dan (5) keterkaitan antar kecamatan.

Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, maka arah pengembangan wilayah setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- (a) Kecamatan Rambah. Pasir Pengaraian sebagai ibu kota Kecamatan Rambah dan sekaligus Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu, diarahkan menjadi pusat pelayanan administrasi pemerintahan Kabupaten, pusat pelayanan jasa, pendidikan, perdagangan regional, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Di kecamatan ini diperuntukkan pula sebagai areal persawahan, tegal-kebun, perladangan, padang rumput peternakan, rawa-rawa, perkolaman ikan, hutan rakyat, hutan negara dan areal perkebunan. Kecamatan ini juga berpotensi sebagai pusat pariwisata yang saat ini masih memiliki 5 (lima) lokasi pariwisata yang menarik dan perlu dikembangkan, yaitu wisata Air Panas Desa Kaiti, Danau Cipogas Desa Sialang, Air Panas Desa Pawan, Makam-makam Raja Rambah Desa Rambah Hilir dan Gua Huta Sikapir Desa Pawan.
- (b) Kecamatan Tambusai. Dalu-Dalu sebagai ibu kota Kecamatan Tambusai, diarahkan menjadi pusat pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan bagi peruntukkan sebagai areal perkebunan, hutan rakyat dan hutan negara. Kecamatan ini juga berpotensi sebagai pusat pariwisata yang saat ini memiliki 1 (satu) lokasi pariwisata yang menarik dan perlu dikembangkan, yaitu wisata Benteng Tujuh Lapis Kelurahan Dalu-Dalu.
- (c) Kecamatan Tambusai Utara. Rantau Kasai sebagai ibu kota Kecamatan Tambusai Utara, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Di Kecamatan ini diperuntukkan pula sebagai areal industri pengolahan sawit, tegal-kebun, perladangan, perkolaman ikan, padang rumput peternakan, hutan rakyat dan hutan negara.
- (d) Kecamatan Kunto Darussalam. Kota Lama sebagai ibu kota Kecamatan Kunto Darussalam, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat

pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Di Kecamatan ini diperuntukkan pula sebagai areal tegal-kebun, perladangan, dan perkebunan.

- (e) Kecamatan Rokan IV Koto. Rokan sebagai ibu kota Kecamatan Rokan IV Koto, diarahkan menjadi pusat administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan mengemban fungsi hutan lindung negara, areal perkebunan, areal tegal-kebun rakyat, areal persawahan, perladangan, perkolaman ikan.
- (f) Kecamatan Ujung Batu. Ujung Batu sebagai ibu kota Kecamatan Ujung Batu, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan Rokan Hulu, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Diharapkan kecamatan ini diperuntukkan pula sebagai areal perkebunan dan areal tegal-kebun.
- (g) Kecamatan Tandun. Tandun sebagai ibu kota Kecamatan Tandun, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan mengemban fungsi areal perkebunan, areal tegal-kebun rakyat dan areal industri pengolahan hasil pertanian.
- (h) Kecamatan Kabun. Kabun sebagai ibu kota Kecamatan Kabun, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya

adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan mengemban fungsi areal perkebunan, hutan negara areal tegal-kebun rakyat dan areal industri pengolahan hasil pertanian.

- (i) Kecamatan Rambah Hilir. Muara Rumbai sebagai ibu kota Kecamatan Rambah Hilir, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Diarahkan sebagai peruntukkan hutan rakyat, perladangan dan perkebunan serta industri pengolahan hasil sawit.
- (j) Kecamatan Bangun Purba. Tangun sebagai ibu kota Kecamatan Bangun Purba, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Di kecamatan ini diperuntukkan pula sebagai areal persawahan, tegal-kebun, perladangan, padang rumput peternakan, perkolaman ikan, persawahan, hutan negara dan perkebunan serta industri pengolahan.
- (k) Kecamatan Kepenuhan. Kota Tengah sebagai ibu kota Kecamatan Kepenuhan, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Diarahkan sebagai peruntukkan areal perkebunan, perikanan tangkap air tawar dan industri pengolahan hasil pertanian.
- (l) Kecamatan Rambah Samo. Rambah Samo sebagai ibu kota Kecamatan Rambah Samo, diarahkan menjadi pusat pelayanan

perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diperuntukkan pula sebagai areal perkebunan, persawahan dan tegal-kebun serta aneka industri.

- (m) Kecamatan Bonai Darussalam. Sontang sebagai ibu kota Kecamatan Bonai Darussalam, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan mengemban fungsi hutan lindung negara, areal perkebunan, areal tegal-kebun rakyat, areal penangkapan ikan air tawar.
- (n) Kecamatan Pagaran Tapah. Pagaran Tapah sebagai ibu kota Kecamatan Pagaran Tapah, diarahkan menjadi pusat pelayanan perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan mengemban fungsi areal industri dan perkebunan.
- (o) Kecamatan Pendalian IV Koto. Pendalian sebagai ibu kota Kecamatan Pendalian IV Koto, diarahkan menjadi pusat administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Kecamatan ini diarahkan mengemban fungsi hutan lindung negara, areal perkebunan, areal tegal-kebun rakyat, areal pertambangan dan industri.
- (p) Kecamatan Kepenuhan Hulu. Pekan Tebih sebagai ibu kota Kecamatan Kepenuhan Hulu, diarahkan menjadi pusat pelayanan

perdagangan, administrasi pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat pemukiman regional dan lokal. Fungsi wilayah yang dilayaninya adalah sebagai wilayah perkotaan, sentra transportasi, sentra perdagangan dan jasa lainnya. Diarahkan sebagai peruntukkan areal perkebunan, perikanan tangkap air tawar dan industri pengolahan hasil pertanian.

5.1.2 Skenario Pengembangan Struktur Ekonomi

Pengembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

Tabel 5.1 Perkiraan Struktur Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 – 2025.

No.	Sektor Usaha	Tahun				
		2005	2010	2015	2020	2025
1.	Pertanian	67,99	54.73	42.20	30.48	22.30
2.	Pertambangan	5,56	4.70	3.56	2.00	2.02
3.	Industri	16,05	19.82	28.00	30.20	31.12
4.	Listrik	0,04	0.56	2.44	3.00	4.78
5.	Bangunan	1,95	1.94	1.46	1.20	1.00
6.	Perdagangan	2,31	9.80	13.54	18.88	22.76
7.	Pengangkutan	1,08	2.25	2.40	5.64	6.00
8.	Keuangan	1,02	1.20	1.40	1.60	2.02
9.	Jasa-jasa	3,98	5.00	5.00	7.00	8.00
		100	100	100	100	100

Berbagai hal yang diperlukan untuk ini adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Untuk menunjang ini semua sudah tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah melalui penyediaan transportasi darat, dan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan sentra ekonomi.

a. Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor unggulan yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan darat.

Selain itu, pengembangan sektor unggulan juga diarahkan pada peningkatan perdagangan yang kuat dan menciptakan iklim bagi terwujudnya kelancaran koleksi dan distribusi barang dan kegiatan jasa perdagangan melalui pengembangan prasarana dan sarana penunjang perdagangan antara lain sistem jaringan logistik komoditi tingkat regional dan jaringan informasi produksi dan pasar serta jaringan logistik komoditi, perluasan pasar lelang lokal dan regional dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar; perkuatan kelembagaan perdagangan, dan penyederhaan prosedur.

1). Penguatan Keunggulan Komparatif

Pengembangan kehutanan, dan pertambangan diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai keunggulan komparatif Kabupaten Rokan Hulu. Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Pengelolaan pertambangan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan.

2). Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan, keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

3). Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor sektor

unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Rokan Hulu.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan perluasan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

4). Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif; penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD); mobilisasi sumber dana masyarakat melalui penerbitan surat berharga daerah; serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

5). Penjaminan Kepastian Hukum

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perizinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5.2 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD Kabupaten Rokan Hulu akan dilaksanakan secara terpadu antar bidang dan antar wilayah, dan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan berkelanjutan.

1. Tahap Pertama (2005-2010)

Pembangunan jangka panjang pada tahap pertama diarahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar untuk mendukung aksesibilitas dan arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan. Pola ini diharapkan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang sejahtera dengan dasar pembangunan yang berkeadilan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan berbagai bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan Iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada tahap pertama ini peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan

dengan memantapkan wajib belajar 9 tahun, pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah umum dan kejuruan, pendidikan informal, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk mendukung kebutuhan pengembangan SDM maka diperlukan dukungan Litbang dan Iptek yang aplikatif di berbagai bidang pembangunan.

Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui promosi hidup sehat dan pembedayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap lapisan masyarakat, serta perluasan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat; disertai berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Distribusi penduduk yang sangat besar memerlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan. Peningkatan pelayanan fasilitas dan pelayanan kesehatan perlu dimulai dengan melakukan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan. Perkembangan penduduk yang cukup tinggi memerlukan pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian. Dalam bidang kesehatan ini juga dilakukan peningkatan informasi kesehatan, pelayanan KB, sampai pada KB mandiri.

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan keahlian dan peluang usaha dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, disertai pemberian informasi ketenagakerjaan. Mengingat perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja, maka diperlukan partisipasi dunia usaha, serta menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. Pada tahap ini telah mulai dilakukan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak pekerja sekaligus dilakukan

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sekaligus serta penghapusan tenaga kerja anak.

Salah satu bagian penting dalam pembangunan adalah peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Peningkatan peran ini dilakukan melalui peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya. Pada tahap ini lebih ditingkatkan kualitas dan perlindungan perempuan dan tenaga kerja perempuan, dan pengembangan kelembagaan yang mendukung peningkatan peran perempuan.

Selanjutnya peran pemuda ditingkatkan melalui pembentukan berbagai organisasi kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda. Peran pemuda lain yang penting adalah meningkatkan prestasi olahraga masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga, dengan peningkatan pembinaan cabang-cabang olahraga unggulan.

Dalam bidang keagamaan, dilakukan peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing. Hal ini juga didukung oleh peningkatan kerukunan umat beragama. Meskipun demikian tetap diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan melalui peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama masing-masing, juga peningkatan kualitas melalui berbagai program pendidikan bagi pengajar keagamaan.

Banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khususnya terutama anak terlantar, anak asuh, keluarga miskin dan korban bencana perlu dikurangi jumlahnya secara menerus dan juga diperluas jangkauan pelayanannya. Hal ini dilakukan dengan (i) pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dan (iii) pengelompokan pemukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Konsep dasar pengembangan ekonomi masing-masing wilayah adalah dengan bersandar pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam mengatasi ketertinggalannya. Upaya yang diperlukan adalah meningkatkan pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian dengan (i) menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan lokal, (ii) peningkatan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah kepada modal, pasar, informasi dan teknologi, (iii) kerjasama dan keterkaitan ekonomi antar wilayah, (iv) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan. Selanjutnya secara proporsional peran pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap awal diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sendiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan, penetapan daerah sentra pembangunan pertanian, pembentukan kawasan agropolitan, serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh. Selanjutnya di bidang pertanian tanaman pangan dilakukan pengembangan infrastruktur pengairan sebagai penunjang utama pertanian.

Pengembangan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada masa yang akan datang, sehingga sangat diperlukan peletakan dasar pengembangan perkebunan baik terkait dengan penyiapan lahan, pengembangan komoditas dan teknologi tepat guna, serta pengolahan hasil perkebunan maupun infrastruktur dan SDM dan kelembagaan

terkait. Pengembangan perkebunan ini dilakukan dengan melakukan pemilihan komoditas potensial, pembentukan sentra perkebunan sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.

Kehutanan memiliki peran penting bagi pengembangan ekonomi, tetapi secara bertahap perannya sebagai pengeksport bahan mentah dikurangi. Dalam tahap pertama diperlukan pemetaan potensi dan fungsi hutan disertai pengelolaan hutan secara lestari dan intensif. Mengingat banyaknya kerusakan pada sumber daya hutan, maka tindakan rehabilitasi dan konservasi SDH dilakukan dalam skala luas, meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaat SDH dan melestarikannya.

Pengembangan peternakan diarahkan menjadi ternak andalan dan unggulan, pemenuhan kebutuhan daging dan telur, disertai pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan. Pengembangan peternakan juga didorong untuk membentuk pengolahan produk peternakan. Mengingat pengolahan produk peternakan ini memiliki nilai ekonomi tinggi maka diperlukan pembentukan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha. Pembinaan pengembangan dan pengelolaan ternak bagi masyarakat juga diperluas pada skala ekonomis, dan memiliki daya saing sebagai bagian dari agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.

Pengembangan perikanan dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan, serta peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. Pengembangan perikanan ini perlu didukung oleh investasi dan kemitraan, disertai upaya pengolahan produk perikanan sebagai produk unggulan Kabupaten Rokan Hulu yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi unggulan perikanan.

Pengembangan perekonomian ini sangat memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas investasi yang bersumber dari

dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat murah, dan nyaman, jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi, agar dapat membuka lapangan kerja baru dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Dalam pengembangan perekonomian peran perindustrian, perdagangan dan koperasi sangat penting dan menentukan. Industri pengolah hasil pertanian, pengembangan industri berbasis produk unggulan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, cluster industri berbasis komoditas unggulan. Pengembangan ini harus disertai peningkatan kualitas SDM dan penciptaan iklim yang kondusif dalam skala regional dan lokal.

Berbagai produk Kabupaten Rokan Hulu harus dipasarkan seluas-luasnya melalui peningkatan volume perdagangan disertai kerjasama antar daerah. Dalam tahap ini neraca perdagangan semakin ditingkatkan. Peran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui ekonomi produktif. Dalam tahap ini juga dilakukan pembuatan prioritas perdagangan (ekspor) non migas. Untuk ini juga diperlukan penguatan usaha dan lembaga pedagang, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Pariwisata, meskipun belum dominan tetapi memiliki prospek pengembangan yang sangat baik, dan pengembangan pariwisata ini dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antar kepariwisataan secara regional dan nasional, pengembangan promosi wisata dan disertai dengan penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan. Kegiatan ini ditunjang oleh pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian dan pengembangan sumber daya manusia bidang kepariwisataan. Selanjutnya pendukung utama perkembangan pariwisata dilakukan

melalui pembentukan sentra pelayanan pariwisata, penetapan festival budaya, penetapan jalur wisata. Wisata andalan pada masa yang akan datang yakni wisata ekologi dan budaya harus ditingkatkan dan dijadikan daya tarik utama.

Untuk meningkatkan nilai ekonomis maka diperlukan peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensial dan sumberdaya alternatif migas. Pada kawasan pertambangan juga dilakukan pembuatan basis data dan penataan ruang pertambangan yang serasi antar sektor. Terkait dengan pemanfaatan ruang bekas penambangan diperlukan penataan dan penertiban bekas tambang dengan melakukan reuse, sebagai langkah intensifikasi.

c. Prasarana Dasar

Prasana dasar yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah transportasi, irigasi dan kelistrikan. Secara keseluruhan ketiga bidang ini sangat menunjang keberhasilan pembangunan antara lain untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, integrasi wilayah dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pengembangan transportasi darat dalam tahap pertama diarahkan pada upaya pemerataan terutama untuk menghindari kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, antar wilayah, antar kecamatan dan antar pedesaan, dan membuka isolasi wilayah, serta peningkatan jalan Kabupaten. Pengembangan ini juga diharapkan akan menjadi stimulan bagi pengembangan wilayah di bidang lain, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan bidang lainnya sehingga terbentuk pola jaringan yang terpadu.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan memprioritaskan pada kemampuan dalam pengairan terhadap sawah, rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung, serta pengembangan embung pada lokasi strategis.

Energi listrik di Kabupaten Rokan Hulu harus ditingkatkan mulai dari penyediaan sumber daya listrik dengan cara intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi, dan dilakukan dengan cara parsial pada permukiman yang terpencar dan dalam jumlah kecil, selanjutnya secara keseluruhan diarahkan pada sistem terpadu pada seluruh kawasan. Secara bertahap juga dilakukan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik. Pola ini disertai dengan kerjasama antar pelaku kelistrikan beserta distribusinya.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan adalah secara terus menerus melakukan peningkatan pelayanan bidang pemerintahan kesegnap masyarakat, meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis, serta keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah. Pada tahap ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur antara lain melalui upaya (i) penataan kembali sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah kompetensinya, (ii) meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur melalui diklat struktural, teknis dan fungsional, (iii) pembinaan mental spiritual sumber daya apratur dengan harapan adanya peningkatan etika, moral dan akhlak dalam fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, melalui (i) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah agar dapat berfungsi lebih memadai, luas dan responsif, (ii) peningkatan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah, dan (iii) penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi mayarakat.

Peningkatan pada bidang hukum dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, pengembangan struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Dalam tahap pertama ini juga dilakukan peningkatan

kapasitas aparat hukum dalam menjamin supremasi dan kepastian hukum, keadilan dan penegakan hukum.

Pengembangan sistem politik yang demokratis, pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya juga dilakukan peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat. Melakukan peningkatan integrasi sosial-budaya disertai penguatan kelembagaan dan perilaku sosial yang menyimpang.

e. **Penataan Ruang dan Lingkungan**

Penataan ruang melalui kegiatan : perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif. Penataan ruang khususnya tata guna tanah diikuti dengan tertib penggunaan/penguasaan tanah, tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Program penataan ruang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang dimulai dengan pengembangan struktur ruang yang dapat mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan wilayah, sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah, pemantapan kawasan lindung khususnya hutan lindung dan konservasi sumber daya air. Mendorong kawasan potensial dan strategis skala provinsi dan kabupaten, serta pada masing-masing kawasan.

Permukiman masyarakat yang tersebar dalam jumlah besar dan kecil menjadikan perlu mengarahkan dan memprioritaskan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selanjutnya pada berbagai wilayah diperlukan penataan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan revitalisasi kawasan pemukiman kumuh.

Pada permukiman transmigrasi dilakukan peningkatan penyediaan hunian yang layak untuk transmigran, disertai dengan penyediaan lahan usaha yang memadai. Lahan usaha ini harus diarahkan pada peningkatan kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi dengan membentuk agroindustri dan agrobisnis.

Terkait dengan pemanfaatan berbagai sumber daya alam, maka perlu diprioritaskan pemahaman tentang kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan kualitas khususnya dalam rangka penanganan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas lingkungan, penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan, dan upaya perbaikan kualitas bagi lingkungan yang telah rusak termasuk pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas. Berbagai upaya juga dilakukan dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam diantaranya melakukan pengelolaan pengendalian banjir.

2. Tahap Kedua (2011-2015)

Bila pada tahap pertama berbagai landasan pembangunan jangka panjang telah dilakukan, maka program jangka menengah tahap ke-2 diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial-ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas

dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kondisi lingkungan secara global juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang makin membaik dan penegakan hukum lingkungan juga semakin baik. Secara keseluruhan dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan unggulan daerah mulai dapat bersaing dalam skala regional dan nasional.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh membaiknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, peran wanita serta pemuda dalam pembangunan yang semakin meningkat, prestasi olahraga mulai bersaing di tingkat nasional, kehidupan keagamaan semakin menunjukkan peningkatan kerukunan, dan indeks kesejahteraan sosial juga meningkat yang ditunjukkan oleh berkurangnya anak terlantar. Secara umum kualitas SDM mendekati rata-rata nasional.

Peletakan dasar peningkatan partisipasi pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata telah dengan partisipasi masyarakat yang mendekati usia wajib belajar 12 tahun. Kualitas tenaga pendidik juga semakin baik yang ditandai oleh semakin banyaknya pengajar yang minimum berjenjang S1. Pada saat yang bersamaan pendidikan unggulan, dan pendidikan berbasis ketrampilan disetiap kecamatan sudah mulai terwujud. Peningkatan kualitas pendidikan ini menjadikan kualitas SDM dan ketenagakerjaan juga semakin membaik.

Peningkatan pendidikan pada sisi lain juga meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan

SDM. Selanjutnya Iptek dan Litbang ini dikembangkan oleh setiap lembaga pemerintah dan swasta sehingga semakin meningkatkan SDM dan kualitas produk setiap kegiatan.

Peningkatan pengetahuan berbagai bidang oleh masyarakat menjadikan kesadaran akan kesehatan juga semakin membaik, dan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan seperti bertambahnya fasilitas kesehatan ke berbagai wilayah sampai pelosok, tenaga medis yang semakin terdistribusi menjadikan kualitas kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya jumlah kematian ibu saat melahirkan, serta semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat. Pemerataan pelayanan kesehatan ini juga semakin dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, serta masyarakat bersama pemerintah telah dapat mengatasi berbagai wabah dan penyakit endemi.

Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan iptek yang lebih baik dan kualitas kesehatan yang meningkat menjadikan daya saing SDM semakin unggul sehingga selanjutnya menjadikan produktivitas tenaga kerja juga semakin baik. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas produktivitas SDM, sehingga sangat mendorong penciptaan peluang kerja yang lebih baik, yang ditandai oleh berkurangnya pengangguran, semakin meningkatnya pendapatan rata-rata, dan semakin beragamnya kegiatan usaha masyarakat. Dalam menopang pengembangan perekonomian berbasis masyarakat semangat kewirausahaan makin berkembang.

Selanjutnya peran wanita dalam berbagai bidang juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh semakin berperannya wanita dalam dunia politik, pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan. Demikian juga kepemudaan dan olahraga semakin menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan pemuda dan semakin meningkatnya prestasi olahraga. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya pertandingan bertingkat regional, semakin meningkatnya peringkat olahraga dalam skala regional, dan telah dikembangkannya sekolah olahraga.

Peningkatan kegiatan masyarakat juga semakin meningkatkan kegiatan bidang keagamaan, juga semakin meningkatkan kerukunan umat beragama. Fasilitas keagamaan semakin membaik, sekolah keagamaan juga menunjukkan adanya peningkatan peran dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik. Hal ini antara lain ditandai oleh jumlah anak terlantar dan anak asuh semakin berkurang, kemandirian masyarakat semakin kuat.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin baiknya iklim investasi secara langsung ataupun tidak akan mendorong pengembangan perekonomian wilayah. Perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertanian dalam arti luas semakin terlihat, ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan secara bertahap mulai berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir. Pengembangan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin berperannya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan daerah dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan.

Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi pertanian unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan agropolitan semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya agribisnis dan agroindustri sehingga semakin

meningkatkan daya saing daerah dari sisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur pertanian, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar pertanian.

Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Sentra perkebunan mulai berkembang, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu-hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam tahap ini peran berbagai *stakeholders* juga mulai berkembang.

Pemanfaatan sumber daya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan.

Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif. Selanjutnya pengembangan ternak unggulan mulai berkembang dengan mantap, dimana hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya import ternak, pengolahan produk ternak menjadikan nilai ekonomis ternak semakin meningkat, dan tenaga kerja bidang peternakan semakin meningkat jumlah dan ketrampilannya.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu juga ditopang oleh perkembangan peternakan dan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh

SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan, dan pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang diandalkan. Perkembangan ini juga ditandai oleh meningkatnya iklim investasi bidang perikanan, semakin membaiknya pola kemitraan antar *stakeholders*.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi. Dalam tahap ke dua ini, industri berbasis pertanian dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Pada tahap ini neraca perdagangan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk.

Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian.

Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam tahap ini sudah mulai dimantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata

unggulan daerah. Promosi wisata sudah pada tingkat nasional yang ditandai oleh terbentuknya jaringan pariwisata nasional.

Pertambangan meskipun tetap memegang peran penting dalam perekonomian tetapi secara proporsional secara bertahap akan menurun perannya. Hal ini ditandai dengan penurunan proporsinya dalam penerimaan daerah. Selanjutnya dalam peningkatan efisiensi dan penjagaan kualitas lingkungan maka pengolahan pertambangan yang lebih ramah lingkungan semakin dikenal dan penataan dan penertiban bekas tambang sebagai langkah intensifikasi semakin meningkat perannya.

c. Prasarana Dasar

Transportasi akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian wilayah dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga didukung oleh energi listrik yang semakin mapan dan irigasi yang semakin meluas wilayah pengalirannya.

Transportasi darat semakin berkembang yang ditandai oleh semakin terhubungkannya antar pusat permukiman perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat perekonomian wilayah dan kawasan unggulan daerah. Pemerataan pengembangan jalan ini semakin terlihat pada wilayah perdesaan. Pengembangan jaringan jalan ini dilakukan secara terpadu dengan sistem transportasi lainnya sebagai sistem intermoda.

Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh peningkatan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, serta terdapat beberapa bendungan atau waduk/embung sebagai cadangan air. Pola ini juga ditunjukkan oleh semakin besarnya produk pertanian tanaman pangan khususnya padi dan palawija.

Pasokan listrik di Kabupaten Rokan Hulu yang mulai mapan semakin ditingkatkan melalui intensifikasi dan diversifikasi terutama pada saat beban puncak. Pengembangan energi listrik ini akan semakin meningkat yang ditandai oleh semakin besarnya pasokan pada berbagai kawasan, serta semakin terdiversifikasinya sumber

listrik. Selanjutnya pengembangan yang terpadu antar jaringan sudah mulai berkembang. Berbagai efisiensi untuk mengurangi kehilangan daya juga dilakukan yang ditandai oleh meningkatnya persentase daya terpakai.

d. Politik, Pemerintahan dan Hukum

Peran pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah, maupun pada susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Selanjutnya peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ini adalah ditandai oleh semakin baiknya tingkat pendidikan pegawai.

Dalam bidang hukum peningkatan pelayanan ditunjukkan oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, semakin berkembangnya struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Selanjutnya penegakan hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan, juga semakin tercipta kepastian hukum bagi berbagai dunia usaha.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pembangunan pada berbagai bidang yang terus meningkat dan mendorong pertumbuhan wilayah akan tetap terarah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan seperti tertuang rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang semakin menunjukkan adanya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan, jaringan pergerakan antar wilayah yang makin mapan, dan kegiatan ekonomi utama wilayah semakin memiliki spesialisasi. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah, pola ruang yang telah ditetapkan baik ruang daratan, maupun ruang udara semakin terarah dan terkendali. Hal ini ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang lindung/konservasi.

Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah.

Kualitas permukiman di berbagai wilayah juga menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas permukiman, serta semakin berkurangnya permukiman Kumuh. Permukiman yang semakin meningkat kualitasnya juga mendorong produktivitas masyarakatnya.

Permukiman transmigrasi akan semakin meningkat kualitasnya yang ditandai oleh semakin menurunnya perumahan yang kurang layak huni, semakin tumbuh menjadi perdesaan bahkan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian wilayah sebagai perdesaan baru. Pada permukiman transmigrasi yang potensial akan membentuk berbagai pusat perekonomian melalui semakin berkembangnya agroindustri dan agrobisnis.

Kesadaran pembangunan yang semakin meningkat disertai kesadaran akan keseimbangan alam menjadikan sumber daya alam akan semakin lestari dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Berbagai pembangunan semakin memperhatikan kaidah AMDAL, semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Disamping itu keberhasilan pengembalian kualitas pada lingkungan yang rusak semakin mendorong berbagai kegiatan penyelamatan lingkungan, seperti reboisasi. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam juga semakin dipahami oleh masyarakat.

3. Tahapan Ketiga (2016-2020)

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat. Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang,

sedangkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah perdesaan, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.

a. Pengembangan SDM

Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dalam dua periode telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga menunjukkan daya saing yang makin tinggi. Secara umum hasil pembangunan SDM yang dilaksanakan dalam periode ini menjadikan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Rokan Hulu telah setara dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat, dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam periode ini pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan perdesaan, wajib belajar telah mencapai 12 tahun, sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang, serta kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional. Pada perkotaan utama sudah dikembangkan pendidikan unggulan bertaraf nasional. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan menjadi pilar utama peningkatan kualitas SDM.

Meningkatnya kualitas pendidikan ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditopang oleh litbang dan iptek. Dengan demikian litbang dan iptek telah menjadi suatu kebutuhan setara dengan kebutuhan informatika dan secara umum juga menunjukkan kesetaraannya dengan tingkat nasional. Berbagai keputusan kebijakan dasar diambil berdasarkan hasil penelitian yang valid dan disepakati berbagai pihak. Hal ini juga ditandai oleh

semakin besarnya peran litbang dan iptek dalam lembaga pemerintah dan swasta.

Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan lebih baiknya perilaku hidup sehat, serta semakin meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis-paramedis menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya usia harapan hidup rata-rata masyarakat, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin dapat ditekan, semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat, wabah dan endemi lokal semakin dapat ditangani secara mandiri. Masyarakat kurang mampu juga semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang prima.

Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia yang telah diperoleh menjadikan daya saing semakin meningkat, pendapatan semakin membaik, juga spesialisasi tenaga kerja semakin terjadi. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, semakin tertekannya pengangguran, dan produktivitas kerja juga semakin mantap. Berbagai kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro seperti kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, manajemen, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sendiri. Demikian juga dengan peluang usaha swasta dibidang telematika, dan berbagai jasa telah berkembang dengan cukup baik. Pada sisi lain, dengan semakin terbukanya peluang usaha yang besar dengan peluang pemasaran nasional dan ekspor ke luar negeri menjadikan perkembangan kewirausahaan menjadi tinggi.

Meningkatnya partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin mendorong terciptanya kesetaraan gender semakin luasnya peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Peran pemuda dalam

pembangunan juga menunjukkan adanya kemapanan yang ditunjukkan oleh banyaknya organisasi pemuda khususnya di bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga. Prestasi olahraga di Kabupaten Rokan Hulu semakin membaik yang ditandai oleh semakin banyaknya pertandingan dalam skala kabupaten dan semakin berperannya Kabupaten Rokan Hulu dalam pengembangan olahraga Riau.

Dalam bidang keagamaan juga menunjukkan peningkatan dimana kerukunan antar umat semakin membaik, kegiatan keagamaan semakin marak, dan fasilitas peribadatan juga semakin berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sekolah berbasis keagamaan semakin mapan, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Peningkatan berbagai bidang ini juga semakin meningkatkan kualitas SDM secara umum, kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan kesejahteraan sosial, dan kemandirian masyarakat semakin membaik.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Bila pada tahap ke-2 perubahan struktur ekonomi sudah mulai mapan, investasi mulai masuk dan semakin meningkat, ketergantungan pada sumber daya alam primer juga semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ke-3 secara keseluruhan juga akan semakin berkembang dan mapan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga menunjukkan peningkatan. Masyarakat banyak semakin tergabung dalam pengembangan koperasi dan berbagai UKM semakin meningkat menjadi besar. Perkembangan dan kondisi perekonomian termasuk investasi di dalamnya sudah sedikit diatas rata-rata nasional.

Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dan hortikultura dapat dipenuhi secara mandiri, pada saat puncak panen bahkan mulai dapat mengekspor hasil. Perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya teknologi pangan sehingga mulai berkembang diversifikasi penyediaan pangan. Selanjutnya sentra produksi dan pemasaran mulai dari unit paling kecil sampai konsumen telah ada dalam sistem jaringan yang saling menguntungkan. Agropolitan sistem telah tumbuh, infrastruktur pertanian juga semakin berkembang. Kegiatan masyarakat juga telah berbasis pada agribisnis dan agro industri yang secara keseluruhan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar juga semakin dikenal oleh petani.

Perkebunan unggulan telah mencapai tingkat mapan dan produknya telah memiliki daya saing dipasaran nasional. Target penyediaan lahan perkebunan telah tercapai, pengembangan telah dilakukan, peran perkebunan menjadi dominan, karena mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan industri pengolahan dari hulu-hilir. Pengolahan hasil perkebunan menjadi pendongkrak perekonomian dan ketenagakerjaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Dalam tahap ini sektor perkebunan akan lebih dimantapkan. Sentra perkebunan sudah berkembang yang ditandai juga oleh semakin berkembangnya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan juga semakin berkembang kegiatannya. Pada tahap ini, maka pemasaran dan pengembangan prasarana pendukung pengembangan perkebunan, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan semakin meningkat.

Sumber daya hutan telah memasuki pengelolaan lestari, kawasan hutan lindung semakin memiliki peran dalam keseimbangan lingkungan dan tetap dipertahankan, sementara

hutan produksi dikelola secara efisien dan hasilnya dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penanganan hasil hutan sudah berjalan lebih efektif, dimana penebangan kayu ilegal sudah dapat ditangani dan penegakan hukum juga lebih efektif. Terhadap tanah yang rusak karena bekas penebangan hutan juga semakin tertangani sebagai bagian dari program reboisasi menerus. Pada tahap ini partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan semakin baik dan masyarakat juga semakin merasakan manfaat pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum terhadap perusakan semakin tertangani dan pencurian hasil hutan semakin minim.

Peternakan pada tahap ini sudah ada pada kondisi yang semakin mantap dalam pengertian peternakan sudah mampu menjadi salah satu penopang ekonomi unggulan, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya mendorong pengembangan industri pengolahan. Kemandirian dapat memenuhi kebutuhan akan ternak telah tercapai, dan selanjutnya hasil ternak unggulan mulai dapat diekspor. Indikator keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya iklim usaha peternakan, semakin tertanggulangnya penyakit ternak. Sumber daya manusia dalam pengolahan ternak juga semakin baik yang ditandai oleh meningkatnya jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan semakin berkembang.

Dalam bidang perikanan terjadi peningkatan produk yang bukan saja menghasilkan dan memasarkan ikan segar, tetapi juga pengolahan ikan. Perkembangan perikanan ini ditopang oleh kualitas SDM yang semakin baik, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Selanjutnya sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, investasi dan kemitraan perikanan semakin diminati, juga kualitas lingkungan perikanan semakin terpelihara dengan

indikasi semakin terkendalinya pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga.

Perkembangan kualitas SDM, struktur ekonomi yang makin makin mantap dan kepastian hukum yang semakin baik dan transparan, mendorong investasi daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi ini diikuti oleh meluasnya pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, dan pasar dalam skala nasional dan internasional.

Berbagai produk andalan dan investasi yang makin berkembang memerlukan pemasaran yang luas sehingga peran perdagangan menjadi sentral. Industri mulai mapan dan kawasan industri telah berkembang. Struktur industri mulai mapan, perkebangan produk hulu-hilir makin berkembang dan berkaitan. Perdagangan produk unggulan makin berkembang, kerjasama antar wilayah dalam menjalin perdagangan makin mapan dan kontinu, serta neraca perdagangan semakin positif. Dalam tahap ini peran BUMD dalam mengembangkan ekonomi semakin penting dan makin terwujud kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya sekaligus sebagai salah satu sumber PAD.

Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian menjadi semakin penting, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya semakin terbentuk kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kontinuitas produk.

Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu semakin meningkat perannya, terutama wisata berbasis ekologi atau *ecotourism*, budaya dan alam. Jaringan wisata nasional semakin mantap yang ditandai oleh adanya integrasi antar kunjungan wisata, semakin berkembangnya akomodasi dan industri wisata. Kemasan wisata yang makin menarik melalui pengembangan jalur wisata dan

kalender wisata yang makin menarik dikemas. Obyek wisata yang ada semakin tertata dan memiliki ciri yang khas sehingga secara keseluruhan membentuk atraksi yang saling melengkapi. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas SDM dan manajemen kepariwisataan.

Pertambangan sampai tahap ini tetap memiliki peran penting dalam perekonomian meskipun secara proporsional dan bertahap menurun perannya. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan efisiensi melalui diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan. Selanjutnya pengelolaan hasil-hasil penambangan yang ada semakin dikembangkan lebih efisien dan terkendali.

c. Prasarana Dasar

Peran transportasi darat semakin penting sebagai penghubung antar pusat permukiman dan pusat produksi yang ditandai oleh semakin banyaknya panjang jalan yang dibangun, semakin terpeliharanya jaringan jalan yang ada, serta semakin berkembangnya angkutan darat antar wilayah, antar provinsi maupun pada kawasan perdesaan. Permukiman dan sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik dengan pusat pemasaran. Dalam skala luas pengembangan jaringan jalan ini dibangun secara lebih terpadu dengan sistem transportasi lain.

Sistem irigasi semakin mampu mendorong pencetakan sawah baru, meningkatkan produk pertanian, yang ditandai oleh semakin besarnya produk pertanian. Perbaikan irigasi ini telah dapat menunjang swasembada pangan. Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh perkembangan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, semakin besarnya produk pertanian, dan semakin optimalnya pemanfaatan sumber daya air. Pemanfaatan irigasi ini semakin didukung oleh pengembangan bendungan dan waduk/embung sebagai cadangan air.

Perkembangan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang menuju kemapanan dalam pembentukan masyarakat sejahtera juga semakin didukung oleh pasokan listrik yang lebih baik. Peningkatan pasokan melalui pembuatan pembangkit baru, pengembangan jaringan yang saling berhubungan atau *interconnected system*, serta diversifikasi sumber pembangkit menjadikan tahap ini tidak kekurangan pasokan pada saat beban puncak terjadi. Pada wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD secara mandiri yang jumlahnya semakin berkurang karena pasokan dari *interconnected system* semakin luas jangkauannya.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ketiga ini peran pemerintah terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanannya telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumber daya manusia dalam bidang ini sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang memadai, serta pada daerah perdesaan juga memiliki pelayanan yang sudah memenuhi standar.

Pada tahap ketiga berbagai perangkat hukum telah memiliki infrastruktur sarana dan prasarana hukum yang memadai, baik pada wilayah yang telah maju maupun baru. Pada tahap ini penegakan hukum sudah lebih efektif dijalankan, kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum. Berbagai regulasi bidang hukum juga lebih dapat dilaksanakan secara efektif, demikian juga alokasi anggaran APBD di sektor hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah memadai.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahap ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat perdesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud yang ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah, yang ditandai oleh semakin berkembangnya kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat-pusat produksi semakin diminati oleh investor.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, dan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup, maka kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik yang ditandai oleh terpenuhinya perumahan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman secara rata-rata. Berbagai permukiman tradisional yang ada juga tetap terjaga, sebagian merupakan aset wisata dan budaya, dengan kualitas lingkungan yang lebih sehat.

Permukiman transmigrasi semakin menunjukkan peningkatan kualitas yang ditandai oleh semakin mapannya tingkat hunian, sebagian kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi kawasan perdesaan dan memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian. Beberapa permukiman transmigrasi yang potensial telah terbentuk

sebagai pusat perekonomian baru yang mampu berkembang sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan akan lingkungan hidup bagi masyarakat, maka kesadaran akan keseimbangan alam juga semakin baik, sehingga berbagai upaya pelestarian sumber daya sudah dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Pendidikan lingkungan sudah mulai terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat dan hal tersebut ditunjukkan oleh semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Amdal sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya pengembalian kualitas lingkungan yang rusak semakin tertangani dengan baik, dan berbagai upaya penyelamatan lingkungan juga dilakukan dengan kesadaran yang tinggi.

4. Tahapan Keempat (2021-2025)

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam tahapan keempat ini maka dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam

skala Asia-Pasific. Secara umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau kesegenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan kesimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

a. Pengembangan SDM

Kualitas SDM dalam periode ini sudah berada dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan membaik, kesehatan rata-rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program pembangunan semakin menampakkan hasil. Dalam konteks ini maka kemandirian masyarakat telah mencapai tingkat mapan, dan daya saingnya tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pendidikan ke segenap wilayah telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan. Mayoritas penduduk dalam usia sekolah dan kuliah mengenyam dunia pendidikan dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah unggulan dan sekolah kejuruan telah berkembang di setiap kecamatan, serta kualitas pendidikan umumnya telah ada diatas rata-rata nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat dan nilai kelulusan yang ada diatas rata-rata nasional, kualitas pengajar pendidikan dasar dan menengah telah berpendidikan minimal S1, dan pembinaan-pelatihan telah berjalan menerus.

Lebih lanjut perkembangan kualitas SDM ini terus ditopang oleh litbang dan iptek yang juga merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan akan litbang dan iptek ini terus mendorong berbagai lembaga untuk memanfaatkan jasa tersebut,

dan berbagai produk litbang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana tentang perlunya penggunaan hasil penelitian, serta makin munculnya litbang dan penggunaan iptek canggih pada lembaga pemerintah dan swasta.

Pada tahap ini perbaikan pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga menjadikan kesadaran akan kesehatan terus meningkat, perilaku hidup sehat telah memasyarakat. Pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta tenaga medis-paramedis telah terdistribusi dengan baik yang ditandai oleh semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hal ini juga terjangkau oleh masyarakat miskin. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat ini ditandai oleh semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai diatas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin kecil, wabah semakin dini dapat diatasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik. Secara umum pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk dalam pelayanan prima.

Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tiga periode sebelumnya meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin membaik, serta spesialisasi tenaga kerja semakin terbentuk. Pola ini secara keseluruhan akan semakin mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja baik dalam pengetahuan maupun keahlian, semakin kecilnya angka pengangguran, dan secara umum produktivitas kerja juga semakin membaik. Penyediaan tenaga kerja yang memadai dan handal sudah tersedia di Kabupaten Rokan Hulu yang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro. Tenaga kerja dengan keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Peningkatan kemampuan ini berbagai bidang ini juga semakin membuka peluang usaha dibidang telematika, dan

berbagai jasa umum dan konstruksi semakin berkembang dengan cukup baik. Dalam tahap ini kegiatan kewirausahaan makin nyata dan sebagian besar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor formal.

Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin mantap dan kesetaraan gender semakin menunjukkan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya peran pemuda juga menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, organisasi pemuda di bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga juga semakin berkembang, bukan hanya pada tingkat kabupaten akan tetapi sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Berbagai peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan Kabupaten Rokan Hulu juga semakin membaik yang ditandai oleh semakin meningkatnya peringkat dalam skala regional, semakin banyaknya petandingan dan eksebisi, serta bertambah semaraknya organisasi atau perkumpulan kepemudaan berbasis olahraga.

Dalam tahapan keempat ini bidang keagamaan menunjukkan semakin baiknya kerukunan antar umat beragama, kegiatan keagamaan semakin marak yang ditandai oleh semakin banyaknya kegiatan keagamaan oleh masyarakat, dan fasilitas peribadatan semakin merata dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama. Sekolah keagamaan semakin mapan dan mampu bersaing dalam skala nasional, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Dalam tahap ini kualitas SDM secara umum semakin membaik demikian juga dengan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, dimana anak asuh dan terlantar semakin mendapat pelayanan sosial yang setara dengan anak lain. Pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan semakin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Perubahan struktur ekonomi masyarakat sudah menunjukkan pola yang semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumber daya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup regional dan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian semakin tinggi, dan masyarakat banyak semakin tergabung dalam koperasi dan berbagai UKM.

Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan baik pada lahan sawah-tegal maupun gambut untuk kebutuhan pangan dan hortikultura telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah diekspor dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan. Diversifikasi pangan sudah dikenal masyarakat dan didukung oleh teknologi pangan yang memenuhi standar kesehatan. Pada tahap ini perkembangan pertanian dan hortikultura telah ditunjang oleh sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional. Agropolitan sistem menjadi andalan pengembangan, infrastruktur pertanian telah mapan. Kegiatan pertanian berbasis pada agribisnis dan agro industri yang memberi nilai tambah produk pertanian semakin terarah.

Pada tahapan keempat ini perkebunan unggulan telah menjadi salah satu tumpuan ekonomi wilayah, memiliki daya saing tinggi dipasaran nasional dan internasional. Peran perkebunan menjadi lebih penting, karena mampu mengembangkan bidang lain dengan berkembangnya industri pengolahan dari hulu-hilir dengan pangsa pasar ekspor. Pengembangan perkebunan ini juga ditandai oleh berbagai diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan. Pada

tahap ini, kerjasama dengan berbagai stakeholders semakin mantap dan masyarakat semakin mendapatkan nilai tambah dari pengembangan perkebunan.

Sumberdaya hutan yang telah dikelola selama tiga periode dalam tahapan keempat ini dapat dikategorikan sebagai pengelolaan lestari dan terkontrol oleh *stakeholders*, kawasan hutan lindung semakin berfungsi sebagai penyeimbangan lingkungan hidup dan memiliki keanekaragaman hayati yang makin tinggi, sementara hutan produksi semakin dikelola dengan arif dan efisien. Ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi. Penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu sudah dapat ditangani dengan lebih sistematis. Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan semakin tertangani yang dilaksanakan dari program reboisasi menerus. Partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sudah mendukung pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari.

Pengembangan peternakan dalam tahapan keempat ini sudah ada pada kondisi yang mantap, mulai dari bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak sudah dapat dilakukan secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya merupakan sebuah rangkaian menerus dari pengembangan peternakan. Pada tingkat ini beberapa produk ternak sudah diolah dan menjadi komoditas ekspor. Indikator keberhasilan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini dan ditanggulangi dengan dini pula. Tenaga ahli bidang peternakan semakin meningkat jumlahnya, dan lembaga penelitian dan penyediaan bibit ternak unggulan semakin berkembang, serta kotoran ternak sudah dapat diolah menjadi pupuk kandang dalam kemasan yang mudah didistribusikan.

Pada tahap ini bidang perikanan memiliki peran semakin penting didukung oleh teknologi yang memadai, pemasaran ikan bukan hanya ikan segar, tetapi juga ikan olahan. Hal ini berarti juga industri pengolahan ikan semakin berkembang. Untuk ini maka

investasi bidang perikanan terus dipromosikan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM semakin ditingkatkan, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, kualitas lingkungan permukiman nelayan semakin baik dan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga pengolah ikan semakin terkendali.

Berbagai kemudahan dalam penanaman modal atau investasi yang kondusif semakin meningkatkan minat investasi daerah berbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembentukan kawasan ekonomi potensial, kawasan strategis yang dipromosikan makin diminati investor, yang perlu terus dijaga kondisinya. Promosi berbagai peluang investasi mudah diakses melalui sarana elektronik maupun melalui promosi langsung.

Perkembangan perindustrian telah mendorong terciptanya struktur ekonomi yang mantap, pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional. Produk unggulan daerah sudah dapat bersaing dalam pasar nasional. SDM perindustrian telah memiliki spesialisasi yang tinggi dengan dukungan kelembagaan yang mendorong pengembangan SDM dan kegiatan perindustrian. Secara umum perdagangan telah memasuki pasar ekspor, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang makin positif. Peran BUMD sudah mapan, berbagai program kemitraan antara BUMD dengan berbagai lembaga semakin meningkat. Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan, pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian semakin meningkat yang pelakunya adalah masyarakat sendiri.

Pemeliharaan kualitas lingkungan yang semakin baik dan budaya yang makin terpelihara menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan memiliki peran makin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Wisata berbasis ekologi atau *ecotourism*, budaya dan alam makin diminati masyarakat, jaringan wisata nasional sudah terbentuk sehingga Kabupaten Rokan Hulu sudah masuk dalam tujuan utama wisata Indonesia. Kalender wisata sudah menjadi bagian dari perjalanan wisatawan nusantara dan

mancanegara. Akomodasi wisata dan industri wisata memiliki ciri atau muatan lokal yang makin menarik. Obyek wisata memiliki ciri khas yang saling melengkapi, biodiversitas semakin melengkapi daya tarik wisata yang sudah berkembang. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin tingginya spesialisasi keahlian bidang pariwisata dan arah kebijakan pengembangan wisata didukung oleh berbagai sektor lain sebagai satu sistem pembangunan yang utuh.

Pada tahap keempat ini pertambangan tetap memegang peran penting yang secara proporsional menunjukkan penurunan jumlah produksi tetapi diikuti peningkatan kualitas pengolahan. Selanjutnya peningkatan efisiensi tetap dilakukan secara menerus, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan semakin dilakukan secara intensif. Pengembangan telah mampu mengekspor pengolahan hasil sebagai industri hilir. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang, maka setiap area bekas tambang ditingkatkan kualitasnya melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya.

c. Prasarana Dasar

Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah terhubung secara keseluruhan. Hal ini ditandai oleh telah terwujudnya jalan dalam propinsi yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar propinsi. Jalan yang telah dibangun dapat dipelihara secara memadai. Permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik ditandai oleh semakin baiknya kondisi jalan sebagai penghubung dengan pusat produksi. Pengembangan jaringan jalan ini terus dipacu untuk membentuk sistem intermoda yang lebih baik.

Peningkatan produktivitas tanah untuk pertanian semakin meluas dan sistem irigasi semakin mampu mengairi dalam jangka panjang serta dapat mengairi sawah yang diperluas. Perbaikan irigasi ini ditandai oleh kemampuan penyediaan pangan secara mandiri bahkan sudah dapat mengekspor. Sebagai pendukung

pengembangan irigasi ini pembangunan bendungan dan waduk/embung juga semakin bertambah jumlahnya.

Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi sumber pembangkit dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan. Hanya sebagian kecil wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD mandiri.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ini pemerintah telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perizinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga lebih mendorong investasi daerah. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertanggungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah perdesaan. Kualitas SDM juga semakin meningkat yang ditandai oleh penggunaan alat yang lebih canggih organisasi yang lebih sederhana, dan tingkat kecepatan pelayanan yang lebih hemat waktu.

Pada tahap ke empat ini bidang hukum telah menduduki tempat sentral dalam perikehidupan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin lengkapnya perangkat hukum pada berbagai wilayah. Penegakan hukum sudah berjalan dengan lebih efektif dimana kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM dengan semakin baiknya tingkat pendidikan bagi aparat hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin membaik. Berbagai deregulasi bidang hukum juga lebih banyak dihasilkan, dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum yang diperlukan.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pelaksanaan pembangunan selama tiga tahap telah menunjukkan hasil yang makin baik, berbagai pelaksanaan program pembangunan lebih mengacu pada rencana tata ruang wilayah, masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha lebih memiliki pemahaman yang baik tentang rencana tata ruang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu. Berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang wilayah dalam skala Kabupaten maupun Kecamatan menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan industri, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung semakin mantap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penyimpangan pemanfaatan ruang semakin terkendali yang ditandai oleh menurunnya simpangan pemanfaatan ruang. Konsistensi terhadap penataan ruang ini juga semakin mendorong investasi daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Semakin meningkatnya indeks kualitas SDM menjadikan pendapatan juga meningkat dan kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian. Masyarakat berpendapatan rendah dapat menyediakan rumah layak dengan lingkungan yang memadai. Permukiman tradisional yang menyimpan berbagai nilai budaya tetap terjaga dengan baik, masyarakat juga mendapat keuntungan dari permukiman tradisional mereka diantaranya sebagai aset wisata.

Permukiman transmigrasi semakin berkembang yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas hunian yang semakin sempurna, meningkatnya kegiatan masyarakat, pasar lokal yang makin maju dan beberapa kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan permukiman transmigrasi yang potensial dan telah terbentuk pusat

perekonomian baru terus berkembang sebagai sentra pemasaran baru sekaligus semakin berperan sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Pada tahap keempat ini pengetahuan masyarakat akan lingkungan hidup semakin baik, kepatuhan akan pengelolaan juga semakin meningkat, dan upaya menjaga keseimbangan alam juga semakin baik. Berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup terus dilakukan, perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam kategori dilindungi terus dilakukan dan *biodiversity* semakin terjaga. Berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan terus berkembang, pendidikan lingkungan dilakukan dengan terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan semakin ditegakkan. Berbagai ketentuan dalam pengelolaan lingkungan sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2005-2025 berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan secara terarah dengan dukungan seluruh *stakeholder*. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Rokan Hulu menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu "**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Dilandasi Imtaq dan Iptek Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Agribisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya**", diperlukan adanya dukungan berupa:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat, adil dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan publik yang partisipatif;
3. Keberpihakan kepada masyarakat, serta
4. Peran serta secara aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

BUPATI ROKAN HULU,



H. A C H M A D